



LAPORAN TAHUNAN 2023

TEGAK
LURUS
MENOLAK
“JOKOWISME”

{ KURAWAL }
FOUNDATION

include | protect | engage

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ILUSI BANAL "JOKOWISME"..... {04}

PROLOG

I. PANGGUNG MUSLIHAT "RAJA JAWA"..... {08}

KERJA-KERJA MENOLAK "JOKOWISME"II. LANGKAH PERTAMA
MENJAGA BARA PEMBANGKANGAN..... {12}III. LANGKAH KEDUA
MENGABARKAN KESAKSIAN..... {19}IV. LANGKAH KETIGA
MENYEMAI KESADARAN KRITIS ORANG MUDA {24}**EPILOG**

V. BADUT DAN SIRKUS..... {30}

Tentang Kurawal {34}**CATATAN** {36}**PERNYATAAN AUDIT** {40}**Tentang Sampul:**

Foto ini adalah saat Presiden Joko Widodo menanti kehadiran Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Ibu Siti Hasmah dalam kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat pada September 2018.

Repro: ANTARA FOTO/
Puspa Perwitasari

KATA PENGANTAR

Presiden Joko Widodo bersama putra pertamanya Gibran Rakabuming Raka menyapa masyarakat sebelum bertolak ke Gedung MPR/DPR RI untuk dilantik menjadi Presiden Indonesia periode 2019-2024.

Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

ILUSI BANAL "JOKOWISME"

Joko Widodo (Jokowi) adalah politisi yang tidak pernah berpegang pada ideologi apapun. Sehingga, sebenarnya agak mudah untuk mendefinisikan apa itu "Jokowisme": "sebuah cara bertindak yang tidak dibimbing oleh keyakinan apapun". Ini kalau kita menerima definisi ideologi versi Karl Mannheim, bahwa ideologi adalah sebuah cara pandang terhadap dunia (*worldview*) yang dianut seseorang atau sekelompok orang untuk melihat kehidupan sosial masyarakat. Masih menurut Mannheim, cara pandang ini seringkali diikuti oleh utopia, yakni dunia impian yang akan diraih. Sebagai contoh, ada pemimpin yang memandang dunia terbagi atas kelas sosial yang pembagiannya tidak tersebar secara merata dan memicu penghisapan dari kelas yang berkuasa terhadap kelas marjinal. Utopia pemimpin ini kemudian adalah eliminasi kelas.

Celakanya, sekalipun negara-negara besar di dunia ini diorganisasi secara ideologis, Jokowisme sama sekali tidak memiliki itu. Jokowi tidak

pernah memegang ideologi apapun. Ia tidak punya pandangan apapun terhadap dunia sosial dan politik. Ia tidak pernah belajar apapun kecuali berdagang – mencari untung. Namun, itu pun tidak dengan serta merta membuatnya menjadi kapitalis – yang berani mati untuk membela kebebasan pasar.

Andi Budiman dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang berusaha mendudukan diri sebagai "ideolog" untuk politisi kosong tanpa ideologi ini, berkata jujur saat menyatakan bahwa Jokowisme itu tidak bersandar pada ideologi apapun. Jokowi adalah politisi tanpa *core*, tanpa keyakinan, atau mungkin paling tepat dalam bahasa Jawa, tanpa *adeg-adeg*. Selayaknya pencuri, apa yang membimbing tindakannya dalam politik adalah kesempatan dan peluang. Dia adalah seorang oportunis yang sangat cepat melihat peluang dan cepat pula mengeksekusinya. Tentu, sebagai orang yang memulai karirnya dari berdagang, ia selalu memanfaatkan kesempatan yang memberinya keuntungan paling besar.

Jika Jokowi tidak memperlihatkan keyakinan apapun, lalu apa yang bisa dipakai untuk mendefinisikannya sebagai politisi? *Proxy* paling akurat untuk menakar Jokowi adalah dari tindakan-tindakannya yang dibisikkan kepadanya oleh para penasehat, konsultan kampanye, dan tentu saja, para tukang survei (*pollster*).

Tindakan yang menjadi *modus operandi* utama Jokowi adalah menjadi seorang populis. Dalam hal ini, Jokowi sangat efektif. Ia membangun mitos sebagai anak kampung, lahir di bantaran kali, dengan rumah kerap banjir. Dia berasal dari keluarga jelata. Imagi bahwa dia berasal dari keluarga jelata

ini mengharubiru kaum liberal dan kelas menengah perkotaan yang secara kultural selalu merindukan kisah "Cinderella". Jokowi adalah Cinderella mereka.

Secara kebetulan pula, saat karir politik Jokowi pasang naik, di Amerika Serikat, ada perubahan yang tidak kalah penting untuk publik Indonesia – naiknya seseorang yang di atas kertas sangat tidak mungkin menjadi presiden, yaitu Barack Obama. Tidak dapat dipungkiri, paralel Jokowi dan Obama sangat kuat menghantui imajinasi kaum liberal dan kelas menengah kota Indonesia. Sekali pun keduanya sebenarnya adalah dua individu yang sangat bertolak belakang.



Jokowi di sampul Majalah Time edisi 27 Oktober 2014.

Repro: TIME/Adam Ferguson

Dengan segera, Jokowi mengenakan mantel populis itu. Pada awal karirnya, ia dianggap sebagai antitesis dari kalangan elit Indonesia – seseorang yang tidak punya kawan di Jakarta; tidak terlibat dengan Orde Baru; bukan pembunuh seperti lawan politiknya. Faktor-faktor inilah yang membuat

kaum aktivis pro-demokrasi hampir seluruhnya mendukung Jokowi. Bisa dikatakan bahwa Jokowi adalah "presiden para aktivis". Mereka berjuang dari gigi ke kuku untuk memenangkan Jokowi. Ia menjadi simbol kemenangan reformasi, walaupun kemudian itu hanya kemenangan semu.

Banyak aktivis dan kaum liberal ketika itu berpikir dan mengira bahwa Jokowi akan berada di sisi mereka (Ingat avatar “I stand in the Right side?”). Sebuah damba bahwa dia akan membereskan persoalan-persoalan hak asasi manusia (HAM) berat dengan adil, meruntuhkan impunitas dan meminta pertanggungjawaban jendral-jendral pelanggar HAM dan membawa mereka ke penjara. Di sisi lain, Jokowi menerjemahkan populisme ini ke dalam program-program kesejahteraan. Dia melanjutkan program-program kesejahteraan untuk kaum miskin yang pernah ia kritik dengan melanjutkan program Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), di samping Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan kartu-kartu lainnya.

Secara diam-diam dia juga melanjutkan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembangunan infrastruktur. Banyak proyek yang sudah dimulai pembangunannya pada masa SBY diambil alih penyelesaiannya dan diresmikan Jokowi. Mengapa? Sebagai orang yang menjadi dewasa pada zaman Orde Baru, Jokowi sangat paham bahwa pembangunan infrastruktur sangat populer di mata rakyat, khususnya kelas menengah yang ingin selalu hidup nyaman. Sebagai pengusaha, ia juga menghitung bahwa perusahaan-perusahaan negara memiliki semua yang diperlukan untuk membangun infrastruktur – termasuk sumber pembiayaan yang disokong oleh bank-bank milik negara.

Taktik dan strategi politik Jokowi memiliki dua kaki: populis dan developmentalis (tepatnya:

infrastrukturalis). Ia perlu menjadi populis untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan membagi-bagikan *welfare* kepada rakyat miskin, Jokowi sesungguhnya membeli atau melakukan *money politics*. Namun, dia tidak menggunakan uang sendiri, melainkan membelanjakan uang negara.

Tidak mengherankan, satu hal yang menjadi benang merah populisme dan infrastrukturalisme Jokowi adalah bahwa ia menelan biaya sangat mahal. Negara harus membayar semua program kesejahteraan untuk kaum miskin, tanpa ada upaya berarti untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinannya. Demikian pula dengan proyek-proyek infrastruktur yang mahal – yang memang dibiayai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga tidak tampak di neraca keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun jika terjadi sesuatu, misalnya kepaillitan BUMN, maka tetap saja negara yang harus menanggungnya. Artinya, para warga negara pembayar pajaklah yang mengongkosi populisme Jokowi.

Populisme dan infrastrukturalisme Jokowi seringkali dibumbui dengan nasionalisme. Ini diwujudkan dengan “kemegahan” (*grandeur*) yang kadang tampak sangat artifisial. Istana negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya. Bentuk istana yang didaku sebagai burung garuda – dengan tinggi kepakan sayap yang melampaui tinggi Monumen Nasional – lebih merefleksikan nostalgia kejayaan masa silam yang terasing dari imaji kekinian warganya.

Tindakan berikutnya yang mencirikan Jokowiisme adalah ketidakpeduliannya pada nilai, prinsip, dan proses demokrasi. Untuk Jokowi, semuanya adalah kesempatan: jika ada celah dalam sistem, maka itu harus dimanfaatkan; jika menjadi penghalang, maka harus dirobohkan. Kalkulasi politiknya adalah kalkulasi transaksional. Ini adalah dunia yang paling dia kuasai. Sebagai pedagang, ia selalu memanfaatkan kesempatan yang memberinya keuntungan paling besar. Seperti pemilihan umum (pemilu), misalnya. Tidak ada dalam persepsi Jokowi bahwa pemilu adalah sebuah proses demokrasi. Untuk dia, pemilu adalah dia mendapat suara 50+1 dan dengan demikian dia mendapat mandat untuk memerintah. Sesederhana itu.

Dangkalnya pemahaman atas demokrasi dalam Jokowiisme tampak di mana-mana. Ia secara telanjang tampak ketika Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan anaknya, Gibran, menjadi calon wakil presiden; dan juga kala Mahkamah Agung (MA) meloloskan Kaesang yang di bawah umur untuk dapat bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk Jokowi, itulah politik. Tidak ada ide bahwa ia bersalah melanggar konstitusi atau hukum. Secara prosedural ia benar. Ini persis seperti Suharto yang mengatakan bahwa ia akan menculik anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ingin mengganti dasar negara Pancasila supaya sidang tidak kuorum.

Karena itu, kita tidak bisa berharap dari orang yang tidak memiliki ide tentang nilai demokrasi akan tunduk pada etika. Tidak ada sedikit pun dalam bayangannya bahwa politik itu memerlukan etika. Politik itu hanya adu kekuatan – siapa yang menang, dia yang dapat. *A zero sum game*.

Sehingga, kita pun harus maklum bahwa Jokowiisme sesungguhnya adalah pandangan anti intelektualisme. Ia tidak anti dalam pengertian melawan intelektualisme. Jauh dari itu. Intelektualisme tidak pernah ada dalam alam pikiran Jokowiisme. Kalau pun harus dibahasakan secara ideologis, maka Jokowiisme adalah “ideologi tentang kekosongan ideologi; kemiskinan ide; kehampaan intelektualitas; dan keinstanan cara berpikir”.

Terakhir, Jokowiisme ini bisa bertahan karena patronase dagang yang dilakukan Jokowi menguntungkan kekuatan politik rente yang sama-sama mengakses

“
Untuk Jokowi,
semuanya adalah
kesempatan:
jika ada celah
dalam sistem,
maka itu harus
dimanfaatkan;
jika menjadi
penghalang, maka
harus dirobohkan.”

dan mengontrol sumber daya kekayaan negara. Dari partai politik hingga konglomerat, patronase itu dibagi-bagikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran para elite. Patronase ini pun tidak mengenal apa yang disebut sebagai konflik kepentingan. Ia memang dan justru menciptakan konflik kepentingan sebab itulah logika dari patronase dagang. Maka, yang paling terlihat dari kekuasaannya adalah konsolidasi elite politik dan pengusaha yang kemudian kita kenal sebagai kekuatan oligarkis. Kekuatan ini tidak melihat kepentingan publik karena satu-satunya kepentingan yang menggerakkan mereka adalah keuntungan untuk diri mereka sendiri.

Oleh karena itu, setelah hampir sepuluh tahun dijerat muslihat, harusnya kita bisa melihat dengan terang benderang bahwa jubah baru sang kaisar – Jokowiisme – tak lebih dari ilusi yang banal. Sebuah ilusi yang harus dibasmi sebelum kuasa sang tiran tak bisa lagi ditundukkan.

Jakarta, Agustus 2024



Presiden Joko Widodo mengendarai motor Chopper Royal Enfield 350 cc saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat pada 2018.

Foto: ANTARA FOTO/
Puspa Perwitasari

PROLOG

Ilustrasi aparat kepolisian mengepung ratusan warga Desa Wadas, Purworejo yang menolak penambangan batu andesit untuk pembangunan PSN Bendungan Bener, 24 April 2021.

Orang-orang harus dibangunkan
Kesaksian harus diberikan
Agar kehidupan bisa terjaga

(Aku Mendengar Suara, WS Rendra)

I. PANGGUNG MUSLIHAT

"RAJA JAWA"

TIDAK terlalu susah memahami mengapa – setelah satu dekade Jokowiisme – kita kini tersungkur ke dalam turunan terjal kemunduran demokrasi. *The limits of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppress*¹. Kuasa tiran, kita tahu, dipanen dari perasaan tidak berdaya secara massal, jeratan tipu daya yang mematikan semangat untuk melawan dan membikin kita enggan melakukan pembangkangan. Dalam konteks Jokowi, bencana demokrasi terjadi ketika publik memberi pemakluman tanpa koreksi terhadap praktik jahat penguasa sampai kerusakannya sulit untuk bisa dipulihkan.

Bagaimana Jokowi bisa merebut kendali publik atas kuasanya? Jokowi dengan cerdas mengubah politik Indonesia menjadi panggung teater untuk melancarkan muslihatnya. *Theatricality and deception are powerful agents*². Perjalanannya menuju istana adalah fragmen-fragmen drama yang dikoreografikan dengan sempurna mulai dari blusukan ke dalam gorong-gorong jalan

raya Jakarta hingga ekstasi massa di panggung konser Dua Jari. Sejak awal, publik dibuat percaya bahwa "Jokowi adalah kita" dan bukan bagian dari "mereka". Sehingga tanpa sadar, kita telah diperdaya oleh gelembung manipulasi informasi lewat media sosial yang telah dipersenjatai secara seksama.

Panggung teater Jokowi adalah jantung dari muslihat populisme, yaitu memainkan perasaan dengan pura-pura menjadi lemah seperti rakyat kecil, tidak elitis, tidak kelihatan terlalu pintar, dan menimbulkan belas kasihan. *Aku rapopo*. Itulah yang membuat pendukungnya menjadikannya 'kultur' dan siap memaklumi segala sepak terjangnya. Kita kemudian diseret-seret untuk memburu musuh bersama yang diciptakan penguasa. Lalu, pelan dan pasti, kita membiarkan dan melazimkan penindasan: warga atau sekelompok warga memang layak dibungkam; dibuat percaya bahwa oposisi adalah bisings (*noise*) yang tak layak dihiraukan.



Jokowi melakukan inspeksi gorong-gorong di kawasan Bundaran HI, Jakarta pada Desember 2012, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Foto: Dadang Kusuma WS

1. Dikutip dari Frederick Douglass, seorang reformis sosial, orator, penulis dan tokoh gerakan [abolisionis](#) yang menentang [perbudakan di Amerika Serikat](#) pada abad 19.

2. Merujuk pada [Ras al-Ghul](#), pendiri dan pimpinan *League of Shadows* serta musuh abadi Batman.

“

Dalam sepuluh tahun, Jokowi telah mentransformasikan dirinya dari wajah jelata plonga-plongo menjadi imaji "raja Jawa" yang terlihat santun namun kejam dalam memainkan kuasanya.

”

Tidak dapat dipungkiri, Jokowi sebagai politikus populis telah mengisi ceruk realitas psikologis dalam berita: ucapannya dan tindak-tanduknya memang diperagakan untuk mengisi apa yang diharapkan oleh para audiens. Ini sebenarnya mirip cara kerja hoaks: kita hanya menyeleksi informasi yang kita anggap sebagai kebenaran karena kita menyukainya dan sesuai apa yang kita yakini menurut preferensi kita. Di bawah situasi itulah sang calon tiran memanufaktur persetujuan untuk proyek-proyek politik dan ekonominya, yang katanya bisa membawa bangsa ini ditakuti negara-negara tetangga dan diperhitungkan di dunia, walaupun dilakukan secara ugal-ugalan. Secara halus maupun kasar, ia telah menanam dan mengembangkan *toxic positivity*: pemakluman atas buruknya tata kelola pemerintahan dan kebijakan-kebijakan konyol yang diambilnya.

Bius drama populisme hanya satu penjelas dari kuasa Jokowi yang nyaris tanpa batas. Muslihat lainnya adalah kepiawaiannya menelikung alat negara untuk melayani kepentingannya. Dia menggunakan kepolisian, kejaksaan, tentara, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat gebuk untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Lebih dari itu, dia menggaet kekuatan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan terbesar di negeri ini untuk menggebuk ormas keagamaan lain yang mengancam dirinya sebelum melekatkan label anti-Pancasila untuk membekukan ormas tersebut tanpa proses pengadilan. Jokowi juga membuat kekuasaan legislatif jadi tidak relevan dengan menguasai mayoritas suara parlemen menjadi pendukungnya.

Dengan demikian, perlawanan yang tersisa hanya dilakukan oleh kekuatan rentan masyarakat sipil yang tidak dilengkapi oleh kendaraan politik. Perlawanan tanpa kendaraan politik tak ubahnya gemuruh tanpa riak. Ia

begitu mudah dipatahkan. Gelombang protes jalanan terbesar pasca-Orde Baru di belasan kota bernama #ReformasiDikorupsi adalah contohnya. Aksi yang berjalan sporadis dan tanpa pemimpin, yang tuntutan-tuntutannya diputuskan lewat konsensus bersama, lebih sebagai gerakan moral untuk mengembalikan demokrasi sesungguhnya ke tangan rakyat ini cuma berumur sepekan setelah disapu aksi kekerasan aparat kepolisian. Hampir 1.500 orang ditangkap dan lima demonstran berusia 15-23 tahun terbunuh.

Represi yang sama dibuat dengan volume semaksimal mungkin untuk memaksa pengkritiknya bicara dengan volume sekecil mungkin di ruang siber – paling terlihat saat pandemi, ketika ada banyak serangan digital terhadap para aktivis dan jurnalis. Represi digital ini menyusup ke akun media sosial dan perangkat komunikasi warga. Masa tiga tahun pandemi itu semakin memperlihatkan watak otoritarianisme Jokowi dan rezim pendukungnya, sementara warga dibiarkan sesak napas dan menghadapi kematian sendiri-sendiri.

Tentu saja, bagi rezim populis seperti Jokowi, rakyat yang terbius, bungkam, ketakutan dan tercerai-berai adalah basis bagi langgengnya kekuasaan. Dalam sepuluh tahun, Jokowi telah mentransformasikan dirinya dari wajah jelata *plonga-plongo* menjadi imaji "raja Jawa" yang terlihat santun namun kejam dalam memainkan kuasanya. Imaji itulah yang diproyeksikan Jokowi ke publik melalui kegemarannya bersolek dengan pakaian ala raja-raja. Saat dia memakai pakaian adat di acara-acara kenegaraan penting, Jokowi hampir selalu tampil dengan pakaian raja atau kepala suku, bukan pakaian adat para jelata. Puncaknya tentu saja saat Jokowi mengenakan baju adat Raja Pakubuwono Surakarta pada upacara Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Istana Negara, 17 Agustus 2023. Sebuah simbolisme dari persepsi dirinya sebagai raja. *L'État, c'est moi*.



Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian Khas Kesunanan Surakarta pada HUT Republik Indonesia ke-78.

Foto: BPMI Setpres/
Muchlis Jr

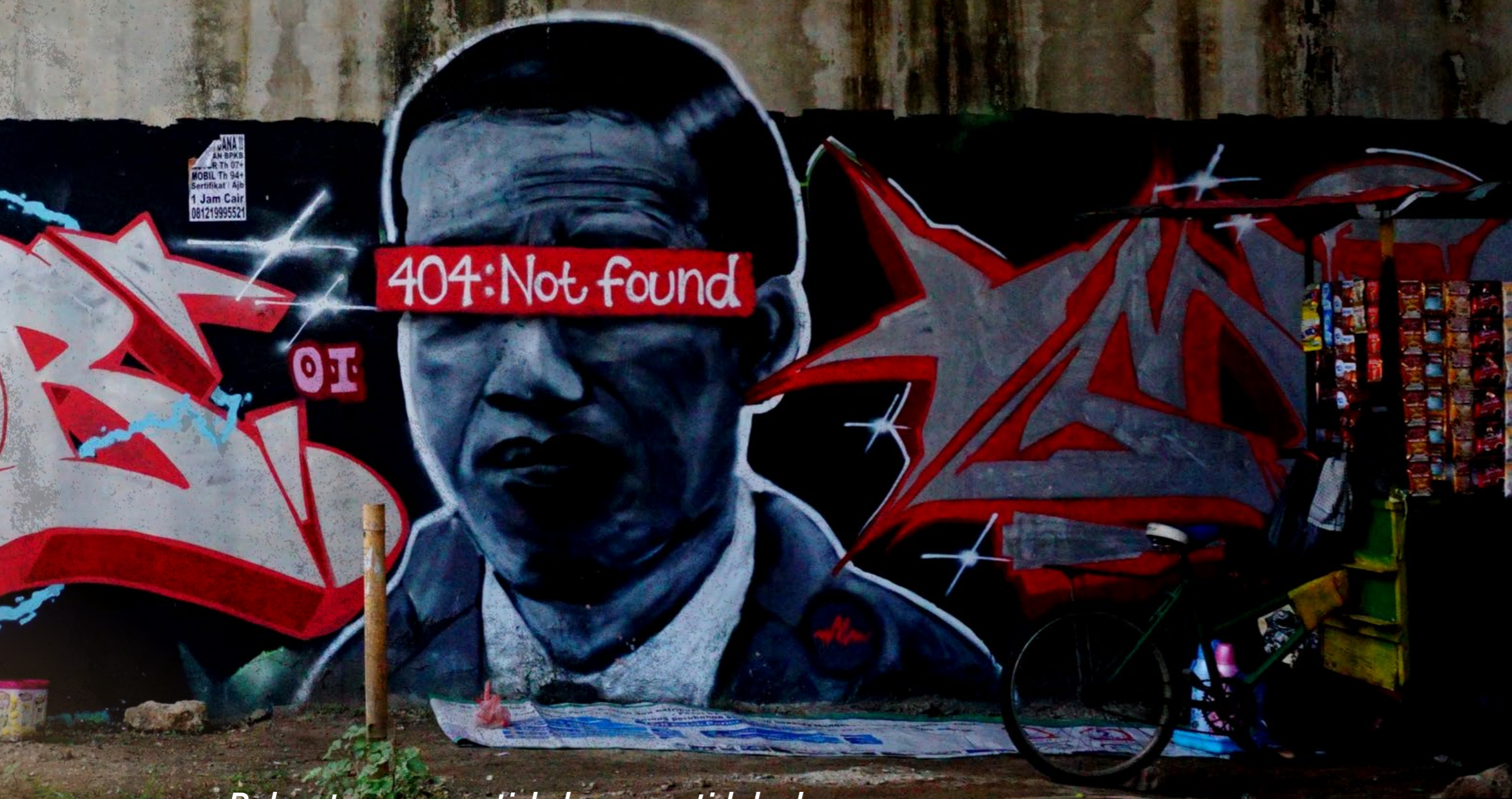
Laporan ini memuat dan merefleksikan kerja-kerja Kurawal untuk menolak Jokowiisme. Kisah yang dirangkum adalah upaya sistematis kami – sebagai bagian dari masyarakat sipil – untuk membangunkan mereka yang terbius, menyatukan mereka yang tertindas, dan mengabarkan kesaksian untuk mengonsolidasikan perlawanan atas muslihat populisme Jokowi. Catatan perjalanan ini tidak mendaku kemenangan karena menjinakkan rezim setangguh pemerintahan Jokowi membutuhkan upaya dan sumber daya ratusan kali lipat besarnya dari yang telah kami lakukan.

Laporan ini berpretensi untuk menyampaikan pesan bahwa warga yang bungkam tak akan pernah bisa menghentikan ketamakan penguasa. Kekuatan masyarakat sipil mungkin sudah sangat berantakan. Meski begitu, pilihan terbaik saat ini adalah dengan terus memperbesar keberanian untuk melawan, untuk terbuka menyerap daya yang masih tersedia, dan menyatukan kekuatan-kekuatan tandingan untuk menolak kekuasaan yang berambisi menjadi tiran.

"If you fight you might lose, but if you don't fight you will always lose."

KERJA-KERJA MENOLAK "JOKOWISME"

II. LANGKAH PERTAMA - MENJAGA BARA PEMBANGKANGAN



Dulu, ataupun nanti, kekuasaan tidak akan pernah tunduk sedikit pun tanpa digugat.

(Frederick Douglass)

Mural 'Jokowi 404: Not Found' di dinding di Tangerang.

Foto: Fajrin Raharjo

Saling bantu dan saling jaga, dan tidak boleh ada satu suara pun yang bertarung sendirian.

Di balik topeng populismenya, rezim Jokowi adalah kekuasaan yang sangat anti-kritik. Di lapangan, ia meredam kebebasan berekspresi memakai alat gebuk polisi dan tentara. Di ruang siber, kekuasaannya melazimkan represi digital gila-gilaan untuk mengebiri kebebasan berpendapat warga.

Kekerasan yang dilakukan negara itu mengirim beragam individu sipil, tak cuma aktivis pro-demokrasi, ke pengadilan dan penjara. Mereka adalah warga negara pembayar pajak yang memilih berbeda pendapat dengan rezim dan menyuarakannya perlawanannya secara terbuka tetapi diperlakukan sebagai subjek kriminal baru dalam rezim anti-kritik dan anti-protes. Hukum, dalam logika ini, adalah alat kekuasaan dan bukan lagi perangkat untuk mewujudkan keadilan.

Budi Pego, Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Syahganda Nainggolan, Victor Yeimo adalah bagian kecil dari daftar panjang warga yang mengalami kriminalisasi karena menyampaikan pendapatnya. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa selama setahun terakhir, represi paling banyak dialami oleh warga yang mempertahankan hak atas sumber daya perikehidupannya, termasuk tanah. Sebagai contoh, di Pakel, Banyuwangi, tiga petani dipenjara 5,5 tahun dalam konflik agraria warisan Orde Baru dengan perusahaan perkebunan. Di pusran konflik itu seorang petani lain ditangkap - dalam praktiknya polisi menculik dari rumahnya pada malam hari, menutupi-nutupi informasi keberadaannya kendati puluhan warga telah mendatangi kantor polisi.

Sementara itu, di Seruyan, Kalimantan Tengah, seorang petani berusia 35 tahun ditembak mati dalam demonstrasi rakyat menentang perusahaan perkebunan sawit, lukanya tembus dada sampai punggung, sedangkan pelakunya, seorang polisi Brimob, hanya divonis 10 bulan penjara. Di Rempang, Kepulauan Riau, pemerintah mengerahkan lebih dari 1.000 polisi dan tentara untuk menyergap, memukul, mengepung, dan membubarkan protes rakyat pada siang hari bolong, 7 September 2023, menyebabkan belasan orang terluka serta belasan siswa sesak napas keracunan gas air mata, dalam aksi koersi negara yang hendak mengukur dan memasang patok investasi sebuah "proyek strategis nasional" seluas 46% dari total luas lahan pulau itu. Ada 2.400-an keluarga dari belasan kampung tua dari dua kelurahan yang terancam digusur dan dipaksa pindah dari ruang sosial-ekonomi dan kulturalnya. Sebanyak 34 warga dijadikan tersangka dan divonis 3-8 bulan penjara.

Dalam rezim yang mementingkan infrastruktur, pemerintahan Jokowi membutuhkan lahan yang sangat

luas. Maka ada banyak sekali kasus-kasus perampasan lahan masyarakat yang diklaim menjadi lahan negara. Selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, ekstraktivisme agraria tak cuma meluas di perkebunan-perkebunan skala besar dan pertambangan tetapi juga di proyek-proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur, properti, *food estate*, proyek pariwisata premium, dan pusat-pusat kawasan industri baru. Itu mengawetkan konflik tenurial berikut kekerasan yang merebak di mana-mana (jumlah PSN di masanya ada lebih dari 200 proyek). Kehancuran ekologis yang tak adaandingannya pun meluber di pusat-pusat rezim ekstraktif baru nikel (per 2023 saja ada 373 konsesi tambang nikel). Cerita sangat lazim dari bala pendudukan ini adalah gelombang pengusuran, pemaksaan relokasi, marginalisasi terutama terhadap perempuan, meledaknya kekerasan, dan kerusakan ekologis yang tak bisa dipulihkan. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria, sedikitnya ada 2.710 letusan konflik agraria dan 2.442 rakyat ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak tanah selama pemerintahan Jokowi.

Maka tak heran, saat Kurawal membuka inisiatif Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) secara luas di tahun 2023, kasus-kasus terkait konflik agraria serta lingkungan dan sumber daya alam adalah yang paling banyak mengakses fasilitas ini untuk menangani praktik persidangan yang bias (*unfair trial*). Embrio inisiatif ini sebenarnya telah dirintis sejak 2019 untuk kasus-kasus sensitif dengan muatan politik yang tinggi. Namun, menguatnya represi rezim Jokowi membuat Kurawal menimbang pentingnya untuk memperluas cakupan skema tersebut guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Sebagaimana namanya, DCTD dibuat untuk merespons dengan segera kebutuhan aktivis dan individu yang membutuhkan perlindungan saat menghadapi situasi darurat akibat perlawanan yang mereka lakukan

terhadap penguasa. Dana ini tak cuma bisa diakses untuk keperluan bantuan hukum. DCTD bisa digunakan untuk layanan perlindungan yang luas, mencakup relokasi dan penyediaan rumah aman, bantuan finansial bagi keluarga korban, bantuan pelayanan medis, maupun dukungan logistik lainnya saat terjadi kekerasan dalam aksi massa, serta penguatan solidaritas dan kampanye saat menangani kasus-kasus represi struktural. Skema DCTD memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan konteks ancaman dan kebutuhan perlindungan di tingkat lokal. Di Papua, misalnya, bantuan digunakan untuk membendung serangan digital terhadap portal media yang menyiarkan informasi yang berlawanan dengan penguasa. Dana ini juga diakses untuk memulihkan perlawanan akar rumput di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Wadas, Jawa Tengah yang dihajar aparat keamanan yang memaksakan proyek strategis nasional.

Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh.

Foto: ANTARA FOTO/Teguh Prihatna



PETA SEBARAN DANA CEPAT TANGGAP DARURAT TAHUN 2023 HINGGA MARET 2024



Inisiatif swa-proteksi ini merefleksikan kepercayaan Kurawal bahwa pilihan bungkam di bawah rezim yang semakin represif adalah pilihan yang tidak akan pernah menyelamatkan kita. *Your silence will not protect you.* Pilihan Kurawal adalah menghidupkan perlawanan dengan memungkinkan mereka yang membangkang untuk terus melanjutkan pertarungan. Sebab, kebungkaman adalah sebuah blok mental yang diharapkan oleh penguasa yang berwatak tiran. Karena itulah, sedari awal dan secara sadar, DCTD dibuat sebagai skema perlawanan untuk menahan laju ketakutan. Selama setahun terakhir (April 2023-Maret 2024), DCTD diakses untuk mendukung 12 kasus yang membantu 45 individu, meliputi warga sipil biasa, mahasiswa, selain petani dan buruh.

“
**Inisiatif Dana Cepat
 Tanggap Darurat
 merefleksikan kepercayaan
 Kurawal bahwa pilihan
 bungkam di bawah rezim
 yang semakin represif
 adalah pilihan yang tidak
 akan pernah menyelamatkan
 kita. *Your silence will
 not protect you.***
 ”

Penghukuman terhadap rakyat yang membangkang dan memprotes proyek-proyek negara dan korporasi ini membentuk subjek kriminal baru di sisi masyarakat sipil. Hukum gampang dibengkokkan atau direvisi, katakanlah lewat pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, demi menopang sistem penundukan. Inisiatif DCTD menyibak fakta miris bahwa dalam hampir semua subjek yang dikriminalisasi, aparat penegak hukum, terutama polisi, terlibat secara aktif melakukan pembungkaman. Pada konflik agraria warisan Orde Baru seperti terjadi di Pakel, kepala polisi setempat bahkan secara terbuka berpihak kepada perusahaan dengan dalih sebagai “mediator”. Di pusat ekstraktivisme baru di kawasan pertambangan dan industri nikel, yang kondisi kerjanya sangat buruk sehingga kematian pekerja seakan menjadi perkara nasib sial dan nasib mujur, polisi-polisi setempat memberangus serikat pekerja. Dalam sebuah kasus, polisi bahkan menahan 18 pekerja.

itu biasa bagi petani yang dipaksa mengambil opsi turun ke jalan atau mendatangi kebun perusahaan,” ujarnya, “tetapi yang mereka khawatirkan saat mereka dilaporkan ke polisi.” Hal ini sangatlah wajar karena kriminalisasi membawa dampak langsung pada keberlanjutan perikehidupan keluarga mereka. *“Sejak suami saya ditahan, keluarga kami dibantu melalui sambungan solidaritas warga, dan saya juga bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan terutama biaya dapur dan uang belanja anak,”* ujar seorang istri dari petani yang menghadapi kriminalisasi.

Di hampir semua lokasi perlawanan, ceritanya sungguh generik: pemerintah dan perusahaan menolak memenuhi hak-hak warga, lalu bala pendudukan berupa alat-alat berat dan puluhan hingga ratusan aparat keamanan diterjunkan, selanjutnya menangkap atau menculik demonstran, entah dalam aksi massa publik, di lokasi perkebunan dan pabrik, atau bahkan di dalam rumah dan di sembarang tempat. Ketika gerakan perlawanan digencet dan para pembangkang yang paling vokal diseret ke pengadilan, gerakannya pun sangat mungkin terpecah sehingga mereka harus mereorganisasi diri.

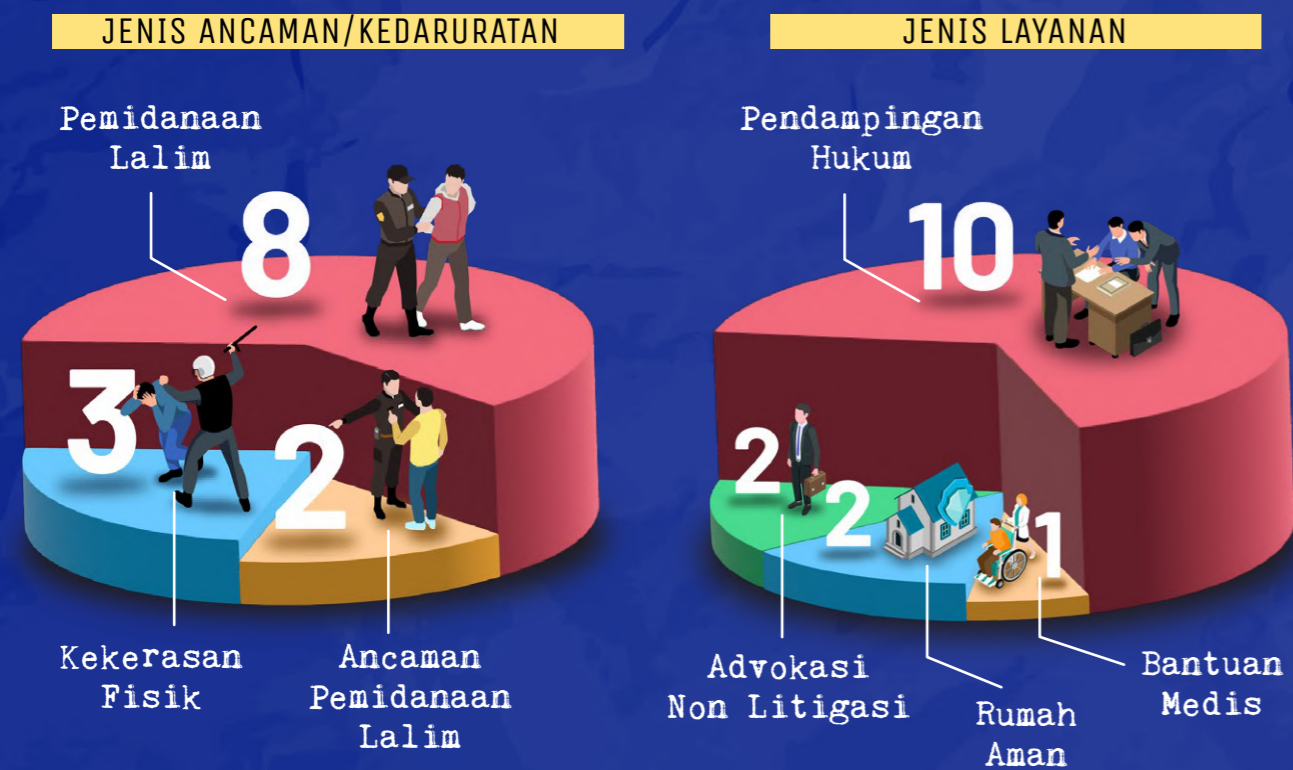
Di titik-titik perlawanan, yang semakin jauh dari pusat-pusat pemberitaan independen maka semakin beringas pula represinya – nyawa manusia seakan tak ada harganya. Polisi enteng saja memberi aba-aba untuk “membidik kepala” warga seperti terjadi di Seruyan, atau menembakkan gas air mata ke sekolah yang penuh dengan anak-anak di ruang kelas seperti terjadi di Rempang. Di Bengkulu, wilayah pesisir barat Sumatera yang mengeram sedikitnya 15 titik konflik agraria dengan perusahaan perkebunan sawit, tiga petani saat ini menghadapi hukuman denda Rp3 miliar kepada perusahaan. Ini mungkin menjadi kasus pertama di Indonesia di mana perusahaan memalak kerugian dengan jumlah fantastis kepada petani kecil yang berupaya mengklaim kembali lahan areal kebun sawit. Pada kasus yang lain di Bengkulu, 14 petani dari 11 desa yang berupaya merebut lahan ditangkap polisi, ditahan, dan divonis 3-6 bulan penjara.

Dalam situasi itu, ujar seorang aktivis yang mengakses DCTD, *“mau tidak mau kita harus melakukan kerja litigasi untuk mendampingi para petani yang ditahan. Tetapi juga penting pada saat yang sama kita terus bangun sekutu.”* “Kasarnya,” tambahnya, *“kita nggak mau kalah 1-0, tidak mau pihak perusahaan perkebunan yang menang. Minimal draw.”*

“Persidangan itu membutuhkan belasan hingga puluhan juta, sidang bolak-balik,” katanya. Dan yang pasti, tidak mungkin sumber daya yang besar itu dimiliki para petani yang sedang merebut hak-haknya. *“Di organisasi kami, kami punya dana darurat sendiri, cuman nggak besar. Sementara urusan kriminalisasi ini harus direspons,”* ia menambahkan. *“Dari informasi teman-teman, kalau butuh support, akses Kurawal. Dari situlah, spontan saja, kami mengakses DCTD.”*

“Aku tahu perlawanan ini haruslah kuat. Para petani tidak bisa bergantung pada kelompok-kelompoknya sendiri,” katanya. *“Makanya, yang aku maksud bangun sekutu itu adalah kita harus melakukan konsolidasi dari titik-titik perlawanan petani. Kita sedang menyiapkan pertemuan para petani. Sehingga ke depan dukungan satu sama lain bisa membesar. Kita harus menang dalam jumlah.”*

DATA JENIS ANCAMAN DAN JENIS LAYANAN ALOKASI DCTD TAHUN 2023 HINGGA MARET 2024



Catatan: Jumlah layanan lebih dari 13 karena satu kasus bisa mendapat lebih dari satu jenis layanan

Pada kasus yang diduga kuat polisi merekayasa tersangka, pada kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang pemberitaan di kota tersebut dikendalikan oleh polisi dan tak ada satupun pengacara yang berani dan independen membela korban, DCTD diakses untuk digunakan oleh tim pengacara dari luar kota sekaligus membantu finansial keluarga korban. Persidangannya sendiri penuh tekanan, serta hakim dan jaksa sangat berat pada berkas acara yang disusun polisi. Tersangka, yang diduga kuat bukan pelaku sebenarnya, divonis 7,5 tahun. Sementara itu, keluarga korban direlokasi ke luar kota dan harus menata kehidupan barunya, dibantu oleh jaringan organisasi masyarakat sipil setempat.

"Saya merasa hampir gila," ujar ibu korban. *"Tetapi saya harus bertahan demi anak-anak. Anak-anakku*

harus dapat keadilan. Saya tahu saya miskin, tapi bukan berarti mereka, para pelaku sebenarnya, bisa berbuat seenaknya ke anak-anakku."

Skema DCTD yang semakin terbentuk sejak 2019, dari Jayapura hingga Rempang, dari Ternate hingga Pakel, meyakinkan Kurawal bahwa adalah penting untuk menyampaikan kepada siapapun yang sudah memutuskan membangkang bahwa mereka punya sekutu; dan mereka tidak akan pernah lagi sendirian. Bagi Kurawal, DCTD adalah wahana untuk saling bantu dan saling jaga; sebuah komitmen bahwa tidak boleh ada satu suara perlawanan pun yang dibiarkan bertarung seorang diri. *"Pilihannya bagi kami,"* demikian Kurawal dalam perjalanan memperkuat sistem dan jejaring proteksi masyarakat sipil, *"adalah mari bersama-sama menjaga bara pembangkangan dan menjadi kabar buruk buat penguasa."*



Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti usai divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Foto: Putra Muhammad Akbar

III. LANGKAH KEDUA - MENGABARKAN KESAKSIAN

Kami sama-sama turun ke lapangan, sama-sama memetakan aktor dari suatu liputan kunci. Lalu informasi yang didapatkan menjadi penting bagi kami untuk mengidentifikasi tingkat bahaya dalam strategi advokasi kami ke depan.

Belajar dari pengalaman saat media-media industri sangat memanjakan penguasa populis seperti Jokowi, hampir mustahil menemukan artikel atau laporan yang mengkritisi popularitasnya. Segalanya terkunci di balik layar, tetapi tak ada usaha atau minim upaya membongkar kunci itu. Semakin ke sini, layarnya semakin kelihatan: si Walikota Solo dan Gubernur Jakarta yang menjadi *newsmaker* dan jadi sirkus pemberitaan media ini tidak berpihak pada keadilan sosial. Tidak ada dalam pikirannya bahwa nilai-nilai demokrasi harus dipertahankan. Tidak ada dalam kepalanya bahwa agenda-agenda reformasi harus diperluas dan diperbesar.

Tetapi, dalam lima tahun terakhir juga muncul suatu tren global, termasuk di Indonesia, yakni kelahiran media-media independen, media-media yang tidak terhubung dengan industri. Media-media ini muncul di banyak daerah, termasuk di Jakarta, yang tujuan didirikannya adalah membela kepentingan publik, membongkar kejahatan lingkungan, mengusik dinasti politik lokal dan nasional.

Dari media-media independen berkepentingan publik inilah, selain media-media industri yang masih merawat semangat dan tugasnya di ruang redaksi sebagai pengawas kekuasaan, muncul seberkas harapan dalam kekuatan institusi media untuk mengabarkan kebenaran dan realitas sesungguhnya di tingkat akar rumput. Mereka melawan sebuah rezim yang menutupi realitas dengan kebohongan dan manipulasi lewat jaringan *influencer* pemerintah.

Bisnis media, sekalipun didukung investor maupun disuntik modal ventura, bukanlah bisnis yang aman dan menguntungkan. Situasi global dalam beberapa tahun terakhir merekam tantangan yang berat bagi media dan produk jurnalisme di tengah lanskap digital

yang dikendalikan algoritma raksasa seperti Alphabet, Amazon, ByteDance, dan Meta. Sepanjang 2023 saja misalnya, dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), hampir seribu jurnalis dan pekerja media menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Upah layak bagi jurnalis dan pekerja media sudah menjadi tuntutan tahunan, tetapi profesi ini semakin suram karena menghadapi banyak represi dari aktor-aktor negara serta tren gelombang PHK dan pemberangusan serikat pekerja yang belum surut selama tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Dengan tuntutan kerja yang tidak masuk akal, kelebihan beban kerja dan minimnya upah, industri pers dan media secara umum turut menyumbang *prekariasi*. Ia membuat kelas pekerja media kesulitan mengembangkan karier. Terlebih lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial dan sangat pro-pengusaha semakin memperlemah perlindungan para pekerja.

Dalam konteks di Indonesia, industrinya dimiliki oleh segelintir konglomerat-*cum*-politikus, atau pengusaha yang menggantungkan kedekatan dengan penguasa serta sebaliknya. Kepemilikan media yang terpusat ini menyumbat ruang redaksi dalam melakukan peliputan mendalam dan investigatif. Selain itu, para reporternya dikejar-kejar target kuota berita per hari dalam sistem produksi yang mengejar tren "konten viral" di media sosial. Dalam logika pasar itu, industrinya sangat mendewakan klik dan bergantung pada kuasa Google dan pengiklan. Ia menciptakan ilusi seakan-akan itulah satu-satunya jalan mengembangkan model bisnis media. Dalam realisme kapitalis itu, peran pers mengawasi kekuasaan dan melayani kepentingan rakyat, pada akhirnya, nyaris susah dilakukan atau dibuat lumpuh sekalian.

Semangat kelahiran media-media kecil independen ini, yang kebanyakan diinisiasi oleh para wartawannya sendiri, adalah kolaborasi. Cetak birunya sudah dilakukan terlebih dulu oleh media-media berkapital besar. Dari kejahatan lingkungan hingga pencucian uang, dari korupsi hingga kekerasan negara, liputan-liputan kolaboratif berhasil membongkar dan memetakan jaringan aktor, relasi kuasa, dan aliran uang yang saling terkoneksi lintas-daerah dan lintas-negara.

Inisiatif kolaborasi liputan itu pada awalnya lahir dari menyutunya pendanaan, tergerusnya ruang redaksi oleh desakan komersialisasi dari dalam industri media sendiri, serta kebutuhan untuk mengungkap kejahatan publik yang semakin kompleks dan berlapis, selain pentingnya menyatukan kekuatan bersama melawan kejahatan yang semakin brutal dan hegemonik.

Kemunculan media-media kecil ini bisa disebut adalah kelahiran baru dalam lanskap jurnalisme digital. Mereka mau keluar dari kepentingan pemodal; mereka mau menjaga independensi; mereka mau menjalankan tugas wartawan seharusnya untuk kepentingan publik. Sekalipun eksperimen skala kecil yang mereka kerjakan mengorbankan dan mengkompromikan banyak hal, termasuk kebutuhan hidupnya. Sekalipun belum tentu berhasil, malahan menghadapi banyak kegagalan.

Meski begitu, bagi Kurawal, kekuatan kecil dan kolektif ini jika disatukan memiliki jangkauan besar.

Pada pertemuan di Bogor, November 2023, Kurawal mengumpulkan lebih dari selusin partisipan dari perwakilan media berkepentingan publik (*public interest media*), dari Aceh hingga Papua, dari Maluku hingga Manggarai. Kesimpulan sementara dari

pertemuan itu adalah mereka meyakini bahwa peran media sudah saatnya, dan seharusnya, melayani masyarakat terpinggirkan. Dengan mengidentifikasi problem-problem internal seperti kekurangan dana dan tenaga, sekaligus sumber daya yang mereka punya seperti semangat kerja berbasis idealisme, mereka mengelola media di luar mekanisme pasar dengan mengandalkan jaringan kerelawanan.

Beberapa ada yang mendapatkan upah bulanan tapi belum layak. Sebagian besar lagi dana yang mereka punya sepenuhnya terserap untuk ongkos liputan bahkan menutupinya dengan kantong pribadi. Segelintir lagi punya dana dan pekerja yang cukup tapi masih terus mencari formula yang tepat mengembangkan audiens.

Sesimpel menghubungkan mereka, sesederhana saling menepuk pundak biar satu sama lain tidak merasa sendirian. Saling mengenali kegelisahan bersama, kekuatan media kecil dengan impian besar ini, menurut Kurawal, adalah prakarsa berani dalam iklim represi negara terhadap kebebasan pers yang terus meningkat setiap tahun, juga kegagalan industri media besar menjaga pagar api ruang redaksi.

Sepanjang 2023, Kurawal memberikan dukungan dana untuk memproduksi liputan-liputan mendalam dan investigatif. Liputan ini menyuarakan suara publik dalam keadilan gender, lingkungan hidup, krisis iklim, masyarakat adat, perampasan lahan serta kekerasan polisi dan militer, di antara topik-topik lain. Ia dikerjakan lewat persekutuan antara media-media publik independen – biasanya para wartawan yang tergabung dalam AJI – dan para advokat publik yang tergabung dalam jaringan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Di Serambi Mekkah, Kurawal memberi dukungan kolaborasi antara kantor LBH Banda Aceh-YLBHI dan Sinar Pidie, media lokal yang berdiri pada 2017. Salah satu liputannya mengungkap kejahatan Kopassus yang “brutal dan kotor” pada masa Daerah Operasi Militer, yang terus menyimpan trauma kolektif, suatu episode pelanggaran HAM berat masa lalu yang gagal diselesaikan negara, 33 tahun kemudian.

“Tentara menyediakan mobil untuk warga agar mereka menyaksikan kepala ayah saya. Angkutan-angkutan umum yang melintas di jalan juga dihentikan. Penumpang angkutan umum diminta menyaksikan kepala ayah saya,” kata Hasballah M. Jalil, kini berumur 47 tahun, tulis laporan Sinar Pidie.

Di Padang, bersama tiga media lokal, kolaborasi ini mengurut misalnya konflik agraria kebun sawit rakyat di Nagari Air Bangis, yang lahannya terancam dirampas proyek strategis nasional seluas lebih dari 30 ribu hektare. Para penduduk menghadapi intimidasi, penangkapan, dan pemulangan paksa oleh aparat keamanan polisi saat 1.500-an warga melakukan demonstrasi selama sepekan di Kota Padang, berjarak 6-7 jam perjalanan darat, pada Agustus 2023.

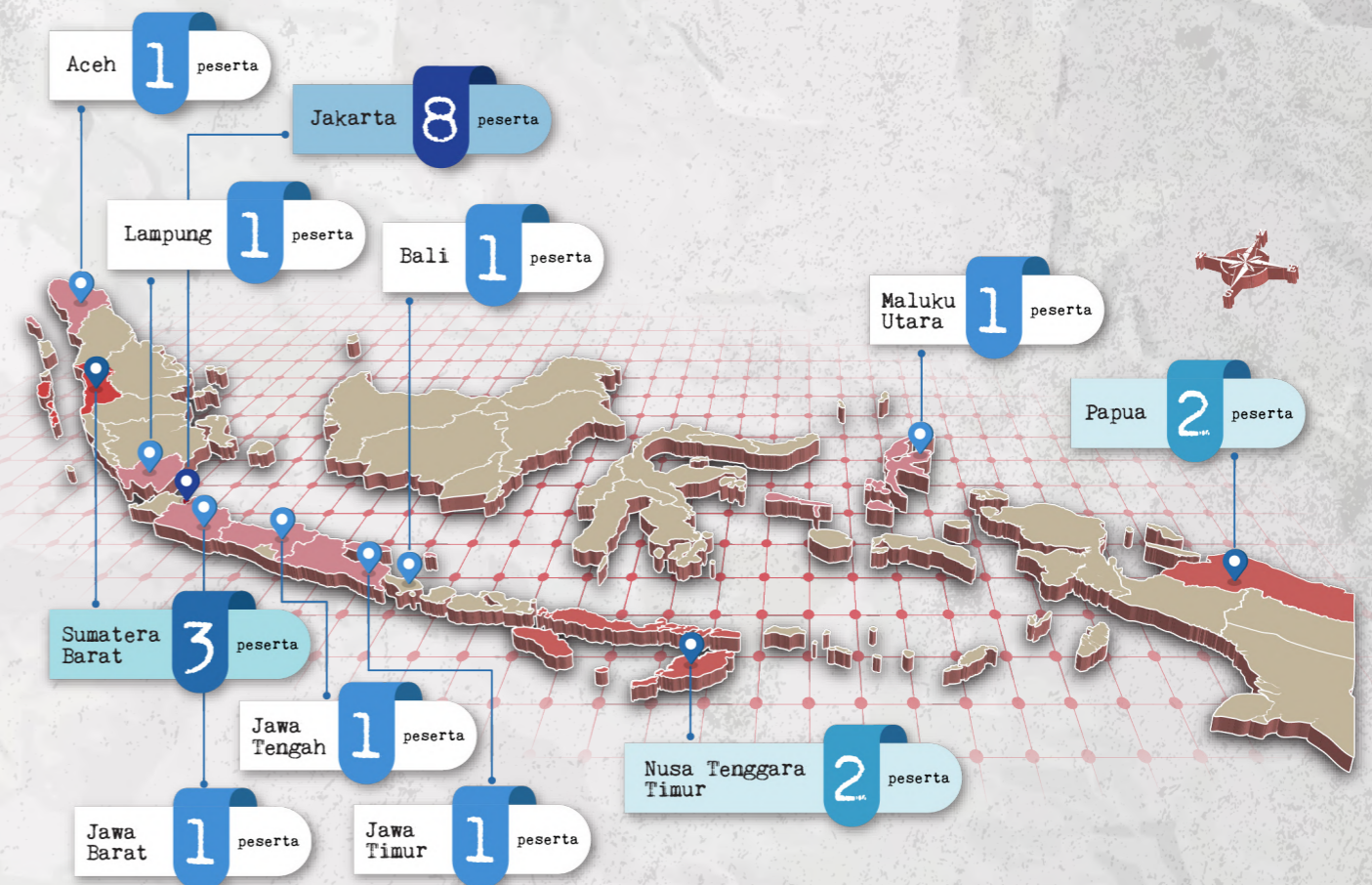
“Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana teman-teman saya ditarik paksa oleh aparat. Mereka diseret masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan sebelumnya. Pemandangan ini semakin suram saat saya melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang menggendong anak-anak mereka dibentak-bentak oleh aparat hingga ibu-ibu dan anak-anak tersebut

menjerit dan menangis ketakutan,” demikian kesaksian dari lapangan mengenai kekerasan polisi Brimob, tulis salah satu laporan dalam kolaborasi tersebut.

“Ketika saya mencoba mendokumentasikan situasi ini, seorang intel menghampiri saya. Dengan nada keras, dia membentak dan menarik-narik saya. Ponsel saya pun diambil paksa. Saya langsung bereaksi dan mencoba merebut kembali ponsel saya. Namun saya dipaksa untuk menghapus semua dokumentasi yang telah saya ambil.”

“Meskipun terpaksa, saya menghapus semua dokumentasi tersebut. Namun, karena mereka tidak percaya, aparat kembali mengambil ponsel saya dan membuka semua privasi saya – WhatsApp, Instagram, galeri, Telegram, Twitter, dan lain-lain – untuk memastikan video itu benar-benar terhapus. Selain itu, mereka menggeledah tas saya.”

PETA SEBARAN MEDIA YANG HADIR DALAM PUBLIC INTEREST MEDIA CAMP



Di Jawa Barat, Kurawal memberikan dukungan kolaborasi antara LBH Bandung dan Bandung Bergerak, media kolektif yang punya komitmen tinggi memihak kemanusiaan. Salah satu liputannya adalah merekam perubahan sosial dan ruang hidup di sebuah kawasan pertanian yang tergerus mega proyek pembangunan lapar lahan serta jadi sentra baru kawasan pabrik. Selain petani terusir, anak-anak keluarga petani menjadi angkatan buruh murah untuk pabrik-pabrik tersebut.

"Setelah lahan-lahan pertanian mereka dipaksa dilepas untuk proyek Bandara Kertajati," tulis laporan ini, "banyak petani berutang ke bank yang sebelumnya mereka bisa hidup tanpa utang dari hasil bertani."

"Dulu bandingannya biarpun sedikit penghasilan, belum pernah yang namanya kita utang bank. Belum pernah dan nggak ngerti bank," ujar Sobirin, seorang petani ya dulu punya lahan tapi kini terpaksa mengolah lahan hutan terlantar Perhutani yang sangat tidak cocok ditanami padi.

Di Semarang, memakai nama Kolaborasi Jurnalis Investigasi Jawa Tengah (KAJI Jateng), kerja sama antara LBH Semarang dan AJI Semarang, salah satu cerita yang mereka kejar adalah simpang siur sebuah proyek strategis nasional perluasan Danau Rawa Pening yang tumpang tindih dengan lahan petani sekitar. Proyek ini berpotensi menjadi konflik agraria yang panas dengan pemerintah mengerahkan tentara-tentara dari Kodam Diponegoro.

Proyek yang dimulai dengan pemasangan 109 patok melingkari 14 desa di empat kecamatan itu, tulis laporan tersebut, telah merampas lahan seluas 300-an ha milik 2.000 keluarga.

"Rumah Mbah saya saja usianya 120 tahun, rumah warisan ibu 70 tahun, kami itu warga pribumi di sini, jauh sebelum Indonesia merdeka," kata seorang warga. "Namun, mereka, para tentara, tiba-tiba datang pasang patok dengan alasan menitip dan menuduh kami menyerobot tanah negara."

Kita bisa menarik setidaknya dua kesimpulan atau pembelajaran penting dari persekutuan kerja-kerja advokasi dan kerja-kerja jurnalistik dalam mengangkat suara paling tersisihkan dan korban kejahatan negara ini.

Pertama, dukungan dana yang cukup untuk peliputan, yang ironisnya sangat kurang dari dalam

“

dukungan dana yang cukup untuk peliputan, yang ironisnya sangat kurang dari dalam industri media sendiri, menghasilkan laporan yang mendalam, komprehensif, berspektif publik, dan bisa mengusut tanggung jawab penguasa.

”

industri media sendiri, menghasilkan laporan yang mendalam, komprehensif, berspektif publik, dan bisa mengusut tanggung jawab penguasa.

Kedua, kolaborasi ini telah mendekatkan kasus-kasus struktural yang diadvokasi jaringan LBH-YLBHI ke media, sehingga para kolaboratornya saling melengkapi dan berbagi peran dalam mencari dan menyediakan informasi termasuk dalam penguatan kapasitas. *"Wartawan bisa mengemas laporan secara menarik tentang kasus-kasus yang sebenarnya sudah lama kita advokasi, sehingga mendatangkan banyak audiens saat menggelar diskusi dengan pembaca,"* ujar perwakilan dari salah satu kantor LBH-YLBHI.

Di salah satu kolaborasi, misalnya, ada pembagian peran: para advokat LBH-YLBHI yang menawarkan ide liputan dan melengkapi informasinya, sementara para wartawan yang menguji silang ke berbagai pihak terutama ke institusi pemerintah dan negara, *"yang biasanya tidak bisa kita masuki,"* ujar perwakilan lain dari kantor lembaga hukum publik.

Ratusan warga bersama mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, menuntut pemerintah provinsi membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menyelesaikan konflik agraria di Nagari Air Bangis.

Foto: Dok. Kurawal

"Kami sama-sama turun ke lapangan, sama-sama memetakan aktor dari suatu liputan kunci kami," ujarnya. "Informasi yang didapatkan ini kemudian penting bagi kami untuk mengidentifikasi tingkat bahaya dalam strategi advokasi kami ke depan."

"Setelah itu kita bikin pendidikan hukum kritis, pengorganisasian, dan mendiskusikan laporan yang diproduksi teman-teman wartawan," tambahnya.

Mengampanyekan kasus-kasus penting yang relevan bagi publik, mengolahnya jadi berita mendalam, mendiskusikannya di kelompok-kelompok perlawanan dengan melibatkan lebih banyak lagi orang, dari para akademisi hingga anak-anak muda progresif, adalah kerja-kerja pengetahuan yang harus terus direproduksi, direplikasi, dan didistribusi. Bagi Kurawal, kerja-kerja semacam ini bisa memperkuat aktivisme gerakan sosial masyarakat sipil.

Problem internal di media-media kecil independen yang menyuarakan kepentingan publik ini tentu saja ada. Menurut Kurawal, problem-problem ini harus bisa segera direspons dalam rencana-rencana penguatan kapasitas mendatang.

Misalnya, pada pertemuan di Bogor, ada kebutuhan pengembangan kampanye di media sosial, sumber utama mengakses berita/informasi. Ada juga kebutuhan memformulasikan model bisnis yang tepat di masing-masing media. Selain itu, perlu mencoba membuka donasi pembaca kendati trennya makin menurun orang mau membayar berita. Penyajian berita dalam bentuk artikel sudah saatnya harus diimbangi dengan format video. Selain itu, pola mendekati diri dengan komunitas pembaca harus dibikin lebih inklusif.

Singkatnya, sisi redaksinya kuat, sisi bisnisnya juga harus kuat. Di sisi lain, orang-orang yang bekerja di media berkepentingan publik pun menyadari jalan sepi ini penuh risiko. Sekalipun begitu, ujar seorang wartawannya, *"Tidak lebih baik atau tidak lebih buruk dianggap gagal menjadi seorang jurnalis, ketimbang menggadaikan hati nurani kepada kepentingan modal."*

Bagi Kurawal sendiri, mengidentifikasi problem internal *public interest media* adalah juga masalah media dan jurnalisme secara umum. Tetapi yang membedakan, dan karena itulah media-media independen ini menjadi bagian dari barisan gerakan sosial, mereka melakukan kerja-kerja jurnalisme bukan sebagai *business as usual*, melainkan membawa aktivisme perlawanan.

IV. LANGKAH KETIGA - MENYEMAI KESADARAN KRITIS ORANG MUDA

Bagi penguasa, orang muda yang dibiarkan kecanduan judi online (judol) dan terlilit pinjaman online (pinjol), yang dibiarkan burnout karena disuruh cepat kerja tapi diupah murah merupakan playbook jitu agar mereka terlalu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri dan tidak sempat memikirkan urusan negara.

Demokrasi hidup dan dihidupi oleh setiap keputusan yang diambil maupun pilihan yang ditunda hari ini. Suka maupun tidak suka, kita harus menerima bahwa demokrasi dimaknai, ditahbiskan, dirajam, maupun dibangkitkan oleh para pemilik hari ini. Hitam putihnya ditentukan oleh mereka yang baru saja beranjak dari ufuk pagi - orang muda. Pertanyaan yang diajukan, tantangan yang dijabarkan bukanlah milik mereka yang tinggal dalam bayang-bayang senja.

Oleh karena itu, belajar dari kekalahan sekaligus menyerap kekuatan orang muda dari aksi protes #ReformasiDikorupsi, Kurawal melihat pentingnya upaya untuk mengkonsolidasikan kembali basis-basis gerakan yang terserak, memfasilitasi ruang pertukaran gagasan dan pematangan pandangan politik, serta mempertemukan mereka dengan kelompok-kelompok progresif dari berbagai lapisan kelas sosial guna menyatukan kekuatan-kekuatan tanding terhadap kuasa negara. Membendung apatisme politik yang sengaja ditebar oleh penguasa di kalangan orang muda adalah kunci.

Kurawal terlibat di sebagian kerja-kerja penggalangan dan mobilisasi yang dilakukan *Social Movement Institute* (SMI), sebuah institusi gerakan yang berbasis di Yogyakarta. Para aktivisnya menggelar Festival Keadilan dilanjutkan Festival Literasi di berbagai kampus di Pulau Jawa. Mereka mengadakan kegiatan itu secara berkala, yang mengumpulkan kekuatan

mahasiswa, di berbagai kota kecil. Sasaran mereka bukanlah ke kampus-kampus ternama, tetapi kampus-kampus setingkat kabupaten. Strategi ini dilakukan dengan kesadaran bahwa di kampus-kampus itu kebanyakan dihuni para mahasiswa dan dosen yang memang lahir dan berasal dari kabupaten tersebut.

"Ketika kampus beken kayak UGM, UI, ITB, sudah jadi kampus borjuis yang mahasiswanya kebanyakan pendatang," kata penggiat SMI. "kami memilih muter ke kampus-kampus kecil karena banyak mahasiswanya pasti lahir di situ dan terikat dengan problem masyarakat sekitar."

"Jadinya masalah bersama yang coba dipecahkan pun sangatlah lokal, tetapi kami juga sekaligus sedang menetralsir pengaruh patronase elite ke mahasiswa."

Organisasi-organisasi kemahasiswaan, sejak kelahirannya, terhubung dengan berbagai spektrum gerakan partai politik (parpol) di Indonesia. Praktiknya menjadi sangat oportunistik. Parpol menjadi patron plus kesempatan karier politik bagi aktivis mahasiswa. Mereka meniru para seniorinya yang sudah jadi elite di tingkat daerah maupun pusat.

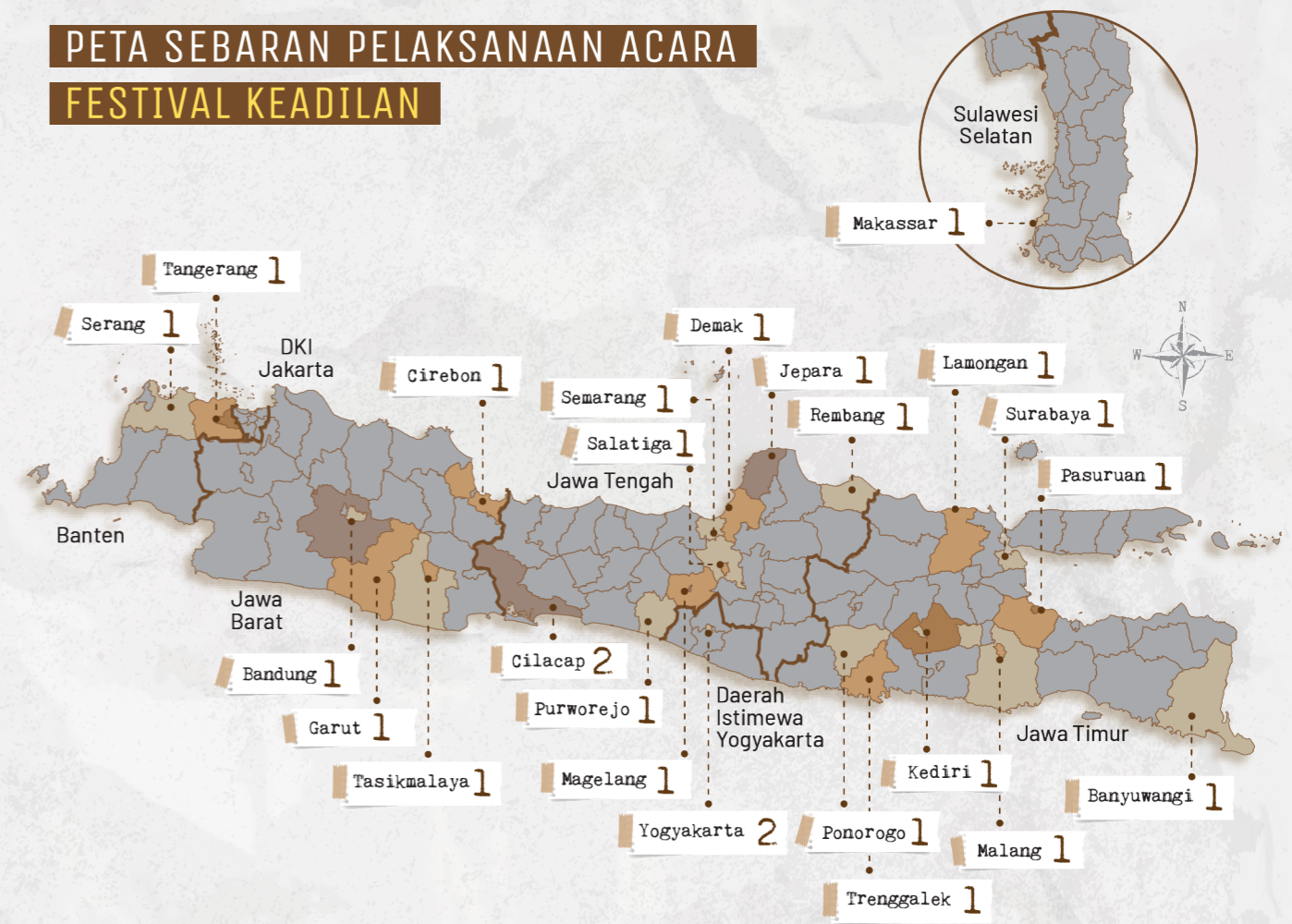
"Relasi patronase itu kuat di tubuh mahasiswa. Patronase elite itu diikuti mahasiswa," kata penggiat SMI. Maka dari itu, tambahnya, "kita harus memutus mata rantai generasi yang sangat patron-klien ini."

“
Membendung apatisme politik yang sengaja ditebar oleh penguasa di kalangan orang muda adalah kunci.
”

Memakai nama festival adalah sebutannya saja, tetapi praktiknya SMI sedang mengembangkan pengorganisasian politik gerakan mahasiswa tanpa terjebak dalam politik elite. Kedekatan dengan kelompok-kelompok mahasiswa membuat SMI juga lebih mudah mengembangkan jejaring pengorganisasian ini. Misalnya, saat ini mereka terlibat dalam advokasi

biaya kuliah mahal alias uang kuliah tunggal (UKT) dalam rezim komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Tuntutan besarnya adalah mengembalikan peran negara mensubsidi pendidikan tinggi dan menghapus peran swastanisasi perguruan tinggi negeri. Tuntutan jangka panjangnya adalah menggratiskan biaya pendidikan tinggi negeri.

PETA SEBARAN PELAKSANAAN ACARA FESTIVAL KEADILAN



Upaya lain untuk membongkar apatisme politik di antara orang muda adalah melalui PhotoDemos dengan bekerja sama dengan PannaFoto Institute. Program aksi lewat media populer ini menggabungkan pendekatan bertutur lewat seni visual antara representasi fotografik dan representasi politik. Program ini berusaha menghubungkan generasi muda dengan isu-isu demokrasi di sekitar mereka. Para partisan muda bertemu dalam sebuah kelas untuk mempertajam ide dan gagasannya yang melampaui masalah-masalah teknis fotografi.

"Barulah kemudian kami mentoring untuk mengeksekusi karya foto-foto mereka," ujar fasilitator PannaFoto.

Mengambil tema "Suara Orang Muda: Demokrasi Kita Hari Ini", menjelang pemilihan presiden 2024, tema kesepuluh partisipan yang dikurasi para mentor sangatlah beragam. Ada kehidupan mahasiswa Papua di Kota Mataram, subjek manusia yang paling sering menerima rasisme di seluruh Indonesia. Ada kehidupan santri perempuan di Bogor, subjek paling rentan menghadapi perundungan seksual. Ada juga tema pasangan muda beda agama yang mencari ruang

aman di Palembang, subjek yang tidak dianggap oleh pengadilan agama. Juga ada tema anak-anak muda yang berhimpun dalam perlawanan Dago Elos, subjek perebutan ruang Kota Bandung sejak 2016.

Selain itu, ada kisah yang merekam penyintas narkoba yang terus mengalami stigma masyarakat. Ada kisah pencarian anak muda tentang sejarah kekerasan 1965 yang "tidak ada di buku sejarah dan tak diajarkan di sekolah". Ada pula kisah seni tradisi di Palu yang dilarang karena dituding penyebab malapetaka. Berikutnya, ada kisah anak muda queer yang mengekspresikan identitasnya dalam masyarakat yang semakin konservatif. Ada cerita yang merekam darurat iklim di sebuah kampung tepi laut yang tergerus abrasi. Ada pula perjalanan reflektif yang menangkap kegelisahan anak-anak muda Generasi Z di Kota Kupang yang akan menjadi pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

"Menerjemahkan demokrasi ke dalam praktik sehari-hari fotografi itu tergolong baru buat saya," kata seorang partisipan. *"Bagian itu yang paling sulit meskipun isu demokrasi bagi saya sendiri sudah tidak asing."*

Semua partisipan berminat pada fotografi sejak dini, tapi mungkin pembedanya adalah apakah di kota mereka ada komunitas yang mengembangkan minat itu? Apakah ada ruang aman di lingkungan sekitarnya yang membuatnya bisa belajar secara inklusif? Dengan kata lain, minat yang terbentuk tak selalu bergantung pada motivasi pribadinya saja, melainkan dari daya dukung sosial di sekitarnya. Salah seorang partisipan misalnya sudah memutuskan berkarier dalam dunia dokumenter visual sebab di kotanya ada komunitasnya.

"Kalaupun partisipan muda ini tidak mau jadi aktivis, minimal pemikiran kritis dalam kelas tertanam dalam kesehariannya," kata fasilitator PannaFoto.

Salah satu tantangan dari kolaborasi bersama Panna adalah problem *amplifying* ke ruang/ platform/ organisasi lain pasca-produksi, ia menambahkan. *"Kami berharap karya-karya PhotoDemos tidak cuma berhenti di sirkel atau ruang program. Kami membayangkan karya-karya ini juga menjadi materi kampanye bersama organisasi lain sehingga dengan begitu materi kampanyenya juga cakep."*

Tantangan menyebarkan karya dari kerja-kerja pengetahuan memang tidak bisa dilakukan sendirian, menurut Talamedia, yang bersama Kurawal memproduksi serial *Buried Chapters*, babak sejarah politik Indonesia yang sengaja dikuburkan negara agar generasi muda tidak mengenal kekerasan sistemik dalam peristiwa 1965 dan Mei 1998.

Gagasan dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan harus didasarkan pada pengungkapan kebenaran. Lewat produksi film dokumenter pendek, serta kampanye dampak dan diskusi, kerja sama ini berupaya membuka dialog mengenai babak-babak dalam sejarah Indonesia yang disimpan dalam sudut-sudut gelap oleh penguasa. Ini adalah upaya melibatkan orang muda untuk menggugat impunitas dan membawa keadilan bagi manusia-manusia Indonesia yang terlupakan dan dilupakan.

Dengan pendekatan animasi, film pertama yang dirilis dalam serial *Buried Chapters* adalah *Hotline 1998*. Film ini mengangkat pengalaman relawan *call center* korban pelecehan dan kekerasan seksual pada kekerasan negara di Jakarta pada Mei 1998.

Film berikutnya, *Acung Memilih Bersuara* merekam perjalanan seorang Tionghoa yang tumbuh dalam diskriminasi dan ketidakadilan terhadap diri dan

komunitasnya. Film ini meraih penghargaan Film Dokumenter Terbaik di ReelOzInd 2023 (Festival Film Pendek Australia Indonesia) dan *honorable mention* dari Raoul Wallenberg Institute (RWI) Asia Pacific Award di Minikino Film Week 9 (penghargaan bagi film-film pendek Asia-Pasifik yang berfokus pada isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perubahan iklim).

Film ketiga adalah *Di Balik Rupa*. Ia mengungkap kisah di belakang layar film propaganda horor Orde Baru *Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI* secara imajinatif. Terakhir, film *Dia Pergi dan Belum Kembali* menceritakan kerusuhan Mei 1998 di sebuah mal di Jakarta dari sudut pandang seorang adik yang kehilangan kakaknya.

"Peristiwa pembunuhan massal 1965 itu sudah banyak dibahas, sudah banyak filmnya, aksesnya juga terbuka," ujar inisiator serial ini. *"Tapi untuk peristiwa 1998, kesulitannya adalah subjek-subjek korban dan pelaku industri kreatifnya masih ketakutan."*

“ Para pelaku kejahatan kemanusiaan peristiwa 1998 masih hidup. Sebagian bahkan sedang menikmati kekuasaan. Dan peristiwa 26 tahun lalu ini menjadi semakin genting dan terus relevan dibicarakan sebab sang penculik malah menjadi presiden. ”

Ratusan mahasiswa tergabung dalam aksi Gejayan Kembali Memanggil bertajuk "Nawa Bencana Jokowi" di Jalan Gejayan, Sleman, Yogyakarta, pada 12 Februari 2024, untuk mengkritik pemerintahan Jokowi.

Foto: Dok. Yayasan Kurawal

Ketakutan ini sangatlah beralasan. Para pelaku kejahatan kemanusiaan peristiwa 1998 masih hidup. Sebagian bahkan sedang menikmati kekuasaan. Dan peristiwa 26 tahun lalu ini menjadi semakin genting dan terus relevan dibicarakan sebab sang penculik malah menjadi presiden. Digendong kekuatan dan kekuasaan pemerintahan Jokowi, Prabowo Subianto tinggal menunggu beberapa bulan saja untuk mendiami Istana.

Selama 26 tahun itu pula generasi baru lahir, yang bahkan tidak tahu sama sekali sejarah aib masa lalu negaranya. Kemenangan Prabowo, terutama dengan mengeksploitasi TikTok, platform yang paling banyak digemari anak-anak muda kelahiran pasca-1998, telah menarik jutaan pemilih pemula. Prabowo dilihat sebagai sosok kakek lucu nan menggemaskan, gambaran yang bertolak belakang dari sifat aslinya yang temperamental, yang jejak masa lalunya di militer telah menciptakan trauma bagi keluarga korban kekejaman di Timor Leste dan Aceh hingga korban penghilangan paksa.

"Karena itulah semakin penting membawa topik kejahatan impunitas ini ke anak-anak muda," menurut inisiator *Buried Chapters*.

"Poin krusial lain," tambahnya, *"kerja-kerja pengetahuan dan penguatan pendidikan yang disokong Kurawal ini seharusnya bisa membentuk sekutu. Minimal dari sana kita bisa melakukan kerja bersama. Bisa melakukan kerja-kerja baru merespons situasi terkini."*

Bagi Kurawal, kerja-kerja penguatan pengetahuan dan pendidikan politik bagi orang muda sepanjang tahun 2023 ini masih dalam pengembangan. Tetapi langkah awal ini semakin menemukan relevansinya ketika para elite penguasa kembali ke setelan lama, yakni setelan otoritarianisme tapi cuma berganti muka.

Di hari-hari ke depan, foto-foto sang penculik dan si anak haram konstitusi bakal mengisi ruang-ruang sekolah, ruang-ruang kampus, ruang-ruang publik. Foto mereka membangkitkan ingatan atas kejahatan masa lalu sekaligus mengeluarkan bau aib nasional.

Teatrikal "hukum pancung" orang dengan topeng berwajah Presiden Jokowi sebagai penutup dari aksi Gejayan Kembali Memanggil, di Jalan Gejayan, Sleman, Yogyakarta, 12 Februari 2024.

Foto: Dok. Yayasan Kurawal



EPILOG



***“Badut yang memasuki istana
tidak akan menjadi raja,
melainkan mengubah istana
menjadi arena sirkus.”***

(Peribahasa Turki)

Presiden Jokowi dan Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto
bersilaturahmi di Gedung
Agung, Istana Kepresidenan
Yogyakarta, Senin, 2 Mei 2022.

Foto: BPMI Setpres/Lukas

(foto ini diedit dengan AI, tanpa
mengubah esensi)

V. BADUT DAN SIRKUS

Bila kamu ikut-ikutan menghibur badut, demikian pepatah lama, kamu telah menjadi bagian dari sirkus. Anggaplah arena sirkus itu mulanya seluas kota kecil, lalu menjadi kota besar, kemudian menjadi sangat besar sampai-sampai luasnya tak terbatas. Si badut juga menikmatinya. Ternyata tinggal di istana sirkus itu sangat nyaman. Sangat mudah baginya mengatur segalanya sesuai keinginannya. Sangat mudah baginya menginginkan semua orang bisa menjadi bonekanya.

Sang badut, yang tahu cara menjadi raja, memastikan semua orang mendapatkan posisi dan kedudukan.

Dia memberi jabatan kepada para pendukungnya yang paling berjasa, dari level relawan sampai ketua partai. Kalau perlu, bikin aturan-aturan baru yang bisa menempatkan sebanyak mungkin pendukungnya ke dalam pemerintahan. Pastikan institusi yang memegang senjata menerima anggaran yang super jumbo. Pastikan juga kementerian yang menjalankan proyek-proyek ambisius infrastrukturnya mendapatkan kucuran dana gila-gilaan meski meninggalkan rekor utang sepanjang sejarah.

Jangan lupakan peran para pengusaha. Ajak mereka tak cuma tidur satu ranjang tapi juga ikut mengurus dapur rumah tangga istana. Beri juga keringanan pajak bagi mereka. Beri insentif yang menguntungkan. Ajak mereka merumuskan aturan-aturan hukum yang membentengi mereka dari tuntutan ganti rugi dan pidana.

Pastikan kaum terdidik tidak bersuara. Kooptasilah kampus. Bentuklah kampus yang mencetak pekerja. Bikin biaya kuliahnya sangat mahal supaya anak-anak muda cuma fokus memikirkan dan menyelesaikan kuliah sehingga mereka terlalu capek melawan apalagi memiliki imajinasi utopia. Kalau masih bandel, hukum dengan ancaman dikeluarkan atau dilaporkan ke polisi, atau ya...dipentungi saja. Gencet kelas menengah pas-pasan sampai tak ada dalam benaknya untuk melawan.

Kotori ruang siber. Beri peran sentral untuk *influencer* dan *buzzer*. Ciptakan opini pecah-belah dan awetkan. Kaburkan kebenarannya, selipkan pengalihan isu. Bentuk mesin propaganda yang bekerja lebih *subtle* ketimbang berita palsu. Perkuat, pertajam, dan pertahankan kelompok-kelompok suara di media sosial berada dalam bilik gema dan gelembung algoritmanya masing-masing. Biarkan mereka hidup dalam tempurung. Kalau terlalu ribut, ancam saja platformnya ditutup.

Perluas kekuasaan eksekutif dan persenjataan perangkat hukum otoritarian sehingga aturan main yang demokratis tidak lagi relevan. Bikin suara oposisi di tingkat legislatif jadi minor betul sehingga pilihannya adalah bergabung dengan penguasa. Buatlah hukum jadi kekuatan pendukung kuasa otoriter.

Hasilnya adalah, dalam sebuah metafora, langit sedemikian rendah sehingga tak seorang pun berani berdiri tegak. Itulah Jokowiisme.

Di ruang kuasa seperti itulah pencurian, pemerasan, dan penggelapan oleh para politikus yang berkuasa tumbuh subur, yang pasti mereka sangat menikmatinya menjadi para kleptokrat sambil bersama-sama membunuh demokrasi.

“

**Penting bagi kita
semua untuk terus
terlibat dalam
kerja-kerja politik
dan kerja-kerja
pengetahuan untuk
pembangunan gerakan
sosial masyarakat
sipil. Penting bagi
kita untuk sama-
sama menyadari
bahwa kita tidak
sendirian. Penting
bagi kita untuk sama-
sama bergerak dengan
melihat tujuan dan
kepentingan bersama.**

”

Apakah ada jalan keluarnya?

Cerita sang badut mulanya berwarna, kemudian jadi monokrom. Dalam satu dasa warsa pemerintahan Jokowi, sirkusnya menjadi milik dia dan para pengasong oligarki. Ia telah membunuh cita-cita reformasi. Ia telah membunuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia memperkuat represi terhadap kebebasan sipil. Ia menciptakan rezim predatoris yang mengeksploitasi kekayaan negara serta melapangkan dominasi kepentingan kelas kapitalis dan para maling.

Bagi masyarakat sipil, jalan yang ada di depan mata, dan sangat mungkin itulah jalan satu-satunya yang harus dilewati, adalah menggalang dan memperbesar kekuatan tandingan. Sebab yang dilawan adalah mereka yang punya kuasa, yang punya uang dan yang punya senjata. Pendeknya, konsolidasi. Memperkuat aliansi. Galang kekuatan dari berbagai lapisan sosial dan lembaga: organisasi masyarakat sipil, kelompok buruh, petani, dan nelayan, jaringan korban pelanggaran HAM, korban-korban ekspansi tambang dan perkebunan industri, masyarakat adat, jaringan rakyat miskin kota, jaringan akademisi progresif, media-media berkepentingan publik, dan lain-lain.

Penting bagi kita semua untuk terus terlibat dalam kerja-kerja politik dan kerja-kerja pengetahuan untuk pembangunan gerakan sosial masyarakat sipil. Penting bagi kita untuk sama-sama menyadari bahwa kita tidak sendirian. Penting bagi kita untuk sama-sama bergerak dengan melihat tujuan dan kepentingan bersama.

Kerja-kerja membangun ekosistem perlawanan harian dan yang akan datang tentu tidak gampang. Ia juga tidak bisa berumur pendek. Ia harus bernapas panjang. Maka, satu-satunya yang kita punya sekarang adalah memperbesar sokongan dan sumber daya yang kuat untuk menghidupi pembangkangan.

Ini jelas tahun yang berat bagi masyarakat sipil tetapi mungkin juga menjadi musim yang baik untuk menanam dan menyuburkan perlawanan.



Presiden Joko Widodo saat kampanye akbar bertajuk Konser Putih Bersatu pada 2019 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Foto: Agoes Rudianto

Tentang Kurawal

Yayasan Kurawal merupakan lembaga filantropi untuk keadilan sosial yang bekerja mendukung gagasan, inisiatif, dan upaya baru untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan bermaslahat di Indonesia dan Asia Tenggara.

Kurawal berupaya mengatasi masalah "demokrasi tanpa demokrat" (*democracy without democrats*) dengan mendorong munculnya individu dan agensi yang mempercayai, menghormati dan menerapkan nilai dan prinsip demokrasi bahwa kuasa mayoritas harus dibarengi perlindungan atas hak minoritas (*majority rules minority rights*) secara konsisten.

Kurawal percaya, tatanan demokrasi yang kuat memerlukan kehadiran lebih banyak demokrat. Oleh karena itu, jika kita mengakui bahwa para demokrat dibentuk, bukan dilahirkan, kita harus menerima bahwa dukungan warga terhadap demokrasi adalah hasil dari proses pembelajaran sosial-politik dan bukan kualitas yang hadir dengan sendirinya secara inheren dalam tiap individu.

Dalam menjalankan organisasi, Kurawal berpegang pada seperangkat nilai, antara lain:

Integritas dan Akuntabilitas

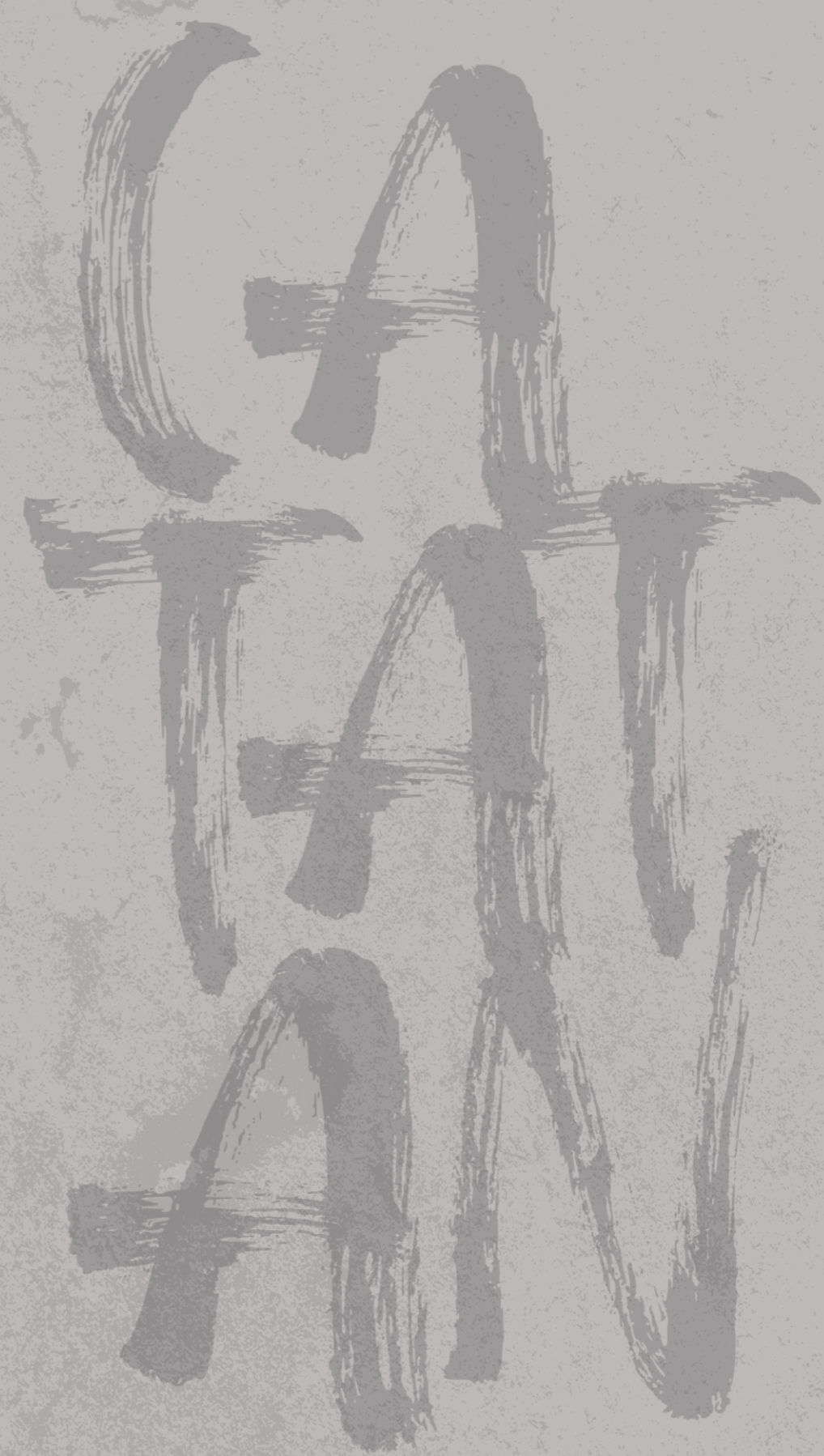
Kurawal mengutamakan prinsip keterbukaan, efektivitas dan pertanggunggugatan dalam pengelolaan organisasi. Kurawal percaya bahwa tata kelola yang bertanggung jawab akan menumbuhkan kepercayaan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kerja-kerja yang dilakukan.

Inklusi dan Kesetaraan

Kurawal berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan inklusivitas dan kesetaraan dalam menjalankan kerja dan perannya di dalam ekosistem masyarakat sipil sebab setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Selain menjadi bagian penting dalam demokrasi yang sehat, komitmen ini adalah cara Kurawal mengakui dan merayakan perbedaan. Dengan begitu, Kurawal dapat belajar dari berbagai perspektif dan pengalaman, yang pada akhirnya dapat memperkaya program dan inisiatif organisasi.

Kebebasan

Untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar akuntabel dan mendengarkan aspirasi serta kekhawatiran masyarakat, Kurawal bertekad untuk tetap independen dalam mensjalankan kerja-kerjanya. Hal ini memungkinkan Kurawal untuk melakukan evaluasi yang objektif dan memberikan kritik yang konstruktif tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah, mitra, dan donor. Kurawal akan tetap menjaga kebebasan dalam mengkritik atau menilai kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan atau kepentingan publik. Dengan cara ini, Kurawal dapat memastikan bahwa suara dan pendapat yang berbeda tetap didengar dan diperhitungkan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.



Prolog - Panggung Muslihat "Raja Jawa"

"Utang Indonesia merayap naik" baca laporan Koran Tempo, "Rekor Utang Sepanjang Sejarah" <https://koran.tempo.co/read/cover-story/487524/rekor-utang-pemerintahan-jokowi> (1 Maret 2024).

"Keuntungannya tetap mengalir ke Jokowi" baca laporan Kompas, "Survei Kompas: 75,6 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Jokowi" <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/06/19/kepuasan-publik-meningkat-tapi-rentan-1> (Kompas.id, 20 Juni 2024).

"Hampir 1.500 orang ditangkap ..." diambil dari liputan *Tokoh Tempo: Massa Aksi 2019*, "Aksi Mahasiswa Terbesar Setelah Reformasi" (*Majalah Tempo*, Desember 2019) <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/159297/aksi-mahasiswa-terbesar-setelah-reformasi>.

"Protes besar-besaran #PapuanLivesMatter di bulan-bulan berdekatan ..." dirujuk dari liputan Victor Mambor dan Syofiardi Bachyul, "Wamena Investigation: What the government is not telling us" (*The Jakarta Post*, November 2019) <https://www.thejakartapost.com/longform/2019/11/26/wamena-investigation-what-the-government-is-not-telling-us.html>.

"Per 2023 ada 373 konsesi tambang nikel" diambil dari liputan Viriya Singgih, "Cina di Hilir: Gurita Oligarki Nikel Indonesia" (*Project Multatuli*, Februari 2024) <https://projectmultatuli.org/cina-di-hilir-gurita-oligarki-nikel-indonesia/>.

Langkah Pertama - Menjaga Bara Pembangkangan

"... 2.442 rakyat ditangkap dan dikriminalisasi..." merujuk KPA yang juga menyebut ketimpangan agraria semakin tajam dengan 68% tanah di Indonesia dikuasai 1% golongan pengusaha dan korporasi besar. "Siaran Pers KPA soal Visi-Misi Kandidat Capres" (Desember 2023) <https://www.kpa.or.id/2023/12/10/visi-misi-para-kandidat-capres-cawapres-belum-menempatkan-reforma-agraria-sebagai-fondasi-pembangunan-nasional/>.

"Tak cuma diakses untuk keperluan bantuan hukum, DCTD ..." merujuk video YouTube "Kabar Buruk Buat Penguasa", <https://www.youtube.com/watch?v=QdTcNbR57k0> (April 2023) dan laman Dana Cepat Tanggap Darurat, <https://www.kurawalfoundation.org/page/emergency-respond-fund>.

"Kekuasaan tiran adalah kekuasaan yang dipanen ..." diambil dari Darmawan Triwibowo, "Saatnya Membangkang" (*Tempo*, Maret 2023) <https://kolom.tempo.co/read/1704184/saatnya-membangkang>.

"... tiga petani dipenjara 5,5 tahun..." merujuk tiga petani Pakel, yaitu Mulyadi (kepala desa) serta Suwarno dan Untung (keduanya kepala dusun) ditangkap polisi-polisi Banyuwangi pada Februari 2023 dan divonis penjara pada Oktober. Kelompok masyarakat sipil yang terlibat advokasi petani Pakel,

"... kelayapan ke banyak daerah..." merujuk misalnya Jokowi mengunjungi Papua belasan kali, mungkin presiden Indonesia yang paling sering datang ke Papua tetapi membiarkan kekerasan terus meningkat di Tanah Papua. *Tim Cek Fakta Kompas*, "Prabowo Sebut Jokowi Lebih dari 19 Kali ke Papua" (*Kompas.com*, Desember 2023) <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/12/12/231414082/cek-fakta-prabowo-sebut-jokowi-lebih-dari-19-kali-ke-papua>.

Baca juga laporan "Di Balik Bisnis Perdagangan Senjata Api di Papua" (*Project M*, Desember 2023) <https://projectmultatuli.org/di-balik-bisnis-perdagangan-senjata-api-di-papua/>.

"... pengamanan ketat yang harus dibuat steril mungkin dari aksi protes..." dirujuk misalnya saat meresmikan proyek pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, kongsi bisnis baru para oligarki di sirkel pemerintahan Jokowi, 3.000 polisi dan tentara berjaga-jaga di desa yang jumlah penduduknya 2.000-an jiwa serta membuat kawasan itu harus steril seluas 3 km. Khairul Anam, "Pasak Kunci di Mangkupati" (*Majalah Tempo*, Januari 2022) <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/165136/luhut-pandjaitan-dan-boy-thohir-di-balik-proyek-kihi>

di antaranya LBH dan WALHI Surabaya, mengajukan kasasi; ketiga petani ini bebas di tingkat kasasi pada April dan Mei 2024. Gafur Abdullah, "MA Kabulkan Kasasi Mulyadi, Susul Dua Petani Pakel" (*Mongabay*, 2024) <https://www.mongabay.co.id/2024/05/21/ma-kabulkan-kasasi-mulyadi-susul-dua-petani-pakel-yang-dinyatakan-bebas/>.

"... seorang petani Pakel lain ditangkap..." merujuk liputan *BBC News Indonesia* (Juni 2024), "Setidaknya puluhan warga Pakel pernah berurusan dengan polisi sebagai tersangka maupun saksi sejak 2018", "Petani Desa Pakel Ditangkap" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp33rmyd82o>.

"... seorang petani 35 tahun ditembak mati..." merujuk Gijik yang tewas ditembak polisi. Selain dia, Upik, 22 tahun, juga kena luka tembak di bagian pinggul bawah oleh polisi dalam aksi protes petani plasma pada Oktober 2023 terhadap perkebunan sawit yang mengusir lahan mereka sejak 2005. KPA mencatat ada 69 warga tewas terkait konflik agraria selama pemerintahan Jokowi (2015-2022); dan Gijik, petani sawit yang mengolah kebunnya sendiri, seorang anak tumpuan keluarga, menambah daftar kematian tersebut. Adi Renaldi, "Sawit Seharga Nyawa" (*Project Multatuli*, Maret 2024) <https://projectmultatuli.org/konflik-kebun-plasma-di-seruyan-sawit-seharga-nyawa/>.

Mengumpulkan data pemberitaan selama 10 tahun (2012-2022), *Gecko Project* mendapati kasus-kasus seputar konflik skema plasma kebun sawit di Indonesia melibatkan lebih dari 200 perusahaan; <https://thegeckoproject.org/id/articles/get-the-data-how-we-built-a-database-of-conflicts-driven-by-indonesia-s-palm-oil-smallholder-scheme/> (Maret 2023).

"... pelakunya, seorang polisi Brimob ..." merujuk Iptu Anang Tri Wahyu yang divonis di PN Palangkaraya karena "alpa menyebabkan orang lain meninggal dan luka berat" dari tuntutan vonis 1 tahun penjara; ia sangat mungkin ditumbalkan di lapangan oleh atasannya demi memutuskan tanggung jawab rantai komando, sebagaimana kerap terjadi dalam rantai impunitas penegakan hukum terhadap institusi polisi dan militer Indonesia. "Brimob Penembak Warga hingga Tewas di Seruyan Divonis 10 Bulan Bui" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240613175417-12-1109590/brimob-penembak-warga-hingga-tewas-di-seruyan-divonis-10-bulan-bui> (*CNN Indonesia*, Juni 2024).

"... polisi setempat berpihak kepada perusahaan dengan dalih sebagai mediator ..." merujuk pemberitaan dari humas Polri, "Dimediasi Kapolresta Banyuwangi, Warga Pakel dan PT Bumisari Bergandengan Tangan" <https://www.humas.polri.go.id/2024/04/29/dimediasi-kapolresta-banyuwangi-warga-pakel-dan-pt-bumisari-akhirnya-bergandengan-tangan-6/> (April 2024).

"... polisi menahan 18 pekerja" merujuk pemberitaan mereka dipenjara antara 1 tahun 4 bulan dan 2 tahun 7 bulan; Siaran pers LBH Makassar, "Tanpa Bukti yang Kuat, JPU Tuntut 4 Tahun Pimpinan Serikat yang Memperjuangkan Hak Buruh PT GNI" (Oktober 2023) <https://lbhmakassar.org/press-release/tanpa-bukti-yang-kuat-jpu-tuntut-4-tahun-pimpinan-serikat-yang-memperjuangkan-hak-buruh-pt-gni/>.

Lihat juga putusan PN Poso untuk kedua pimpinan serikat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee874d0ec2ccca8370303933323332.html>.

Langkah Kedua - Mengabarkan Kesaksian

"... hampir seribu jurnalis dan pekerja media menjadi korban PHK" merujuk laporan Aliansi Jurnalis Independen, *Krisisi Kebebasan Pers di Tengan Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi: Laporan Situasi Kebebasan Pers AJI 2023* (Januari 2024) <https://www.aji.or.id/sites/default/files/arsip/Draft-Final%20Laporan%20Situasi%20Kebebasan%20Pers%20%283%29%20layout%20A5.pdf>.

"... industri pers dan media secara umum turut menyumbang prekariasi..." merujuk Estu Putri Wilujeng, Ikhsan Raharjo, Rizki Dhan Nushur, Dios Lumban Gaol, *Upah Layak untuk Semua: Model Pengupahan Pekerja Lepas Industri Media dan Kreatif* (SINDIKASI, Maret 2024) https://sindikasi.org/resources/Upah_Layak_Untuk_Semua.pdf.

"Di Bengkulu ... mengeram sedikitnya 15 titik konflik agraria..." merujuk Siaran Pers WALHI Bengkulu, "Gubernur Maluku Gagal Mewujudkan Keadilan Agraria" <https://www.walhibengkulu.or.id/2023/09/30/gubernur-bengkulu-gagal-mewujudkan-keadilan-agraria/> (September 2023).

"tiga petani menghadapi hukuman denda Rp3 miliar..." merujuk Harapandi, Rasuli, dan Ibnu Amin yang dinyatakan bersalah mengganggu kegiatan perusahaan tapi tidak terbukti harus membayar tuntutan kerugian kepada perusahaan sebesar Rp7,2 miliar di tingkat PN Mukomuko. Petani menolak dinyatakan bersalah, karena jika menerima, mereka harus menjauhi akses mereka terhadap tanah. Mereka kemudian mengajukan banding. Di tingkat banding, mereka justru diharuskan bayar ganti rugi Rp3 miliar. Saat ini ketiga petani mengajukan kasasi. Kanopi Hijau Indonesia, "Diiringi Tarian Gadai, 3 Petani Mukomuko ajukan kasasi terhadap PT DDP" <https://kanopihijauindonesia.or.id/diiringi-tarian-gadai-3-petani-mukomuko-ajukan-kasasi-terhadap-pt-ddp/> (Juni 2024).

"Sejak suami saya ditahan ..." merujuk pemberitaan "13 Petani Air Palik Dibebaskan, Perjuangan Mengusir PT BRS Terus Berlanjut" <https://www.bengkuluinteraktif.com/13-petani-air-palik-dibebaskan-perjuangan-mengusir-pt-brs-terus-berlanjut> (Juli 2023).

"Saya merasa hampir gila ..." merujuk dua liputan *Project Multatuli*, "Merekam Persidangan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di PN Baubau" <https://projectmultatuli.org/dua-putri-saya-dicabuli-saya-lapor-ke-polres-baubau-polisi-malah-tangkap-anak-sulung-saya/> (Oktober 2023).

"Dua Putri Saya Dicabuli, Saya Lapor ke Polres Baubau, Polisi Malah Tangkap Anak Sulung Saya" <https://projectmultatuli.org/dua-putri-saya-dicabuli-saya-lapor-ke-polres-baubau-polisi-malah-tangkap-anak-sulung-saya/> (Maret 2023).

"... para reporternya juga dikejar-kejar target kuota berita per hari..." merujuk Diana Gaizka, "Jadi wartawan itu harus mesti menguasai Kage Bunshin untuk kejar kuota berita" (Remotivi, 2019) <https://www.remotivi.or.id/headline/liiputan/557>.

"Tentara menyediakan mobil untuk warga..." merujuk liputan *Sinar Pidie*, "Cara Kotor Kopassus Memburu Pawang Rasyid" (Agustus 2023) <https://sinarpidie.co/aksara/cara-kotor-kopassus-memburu-pawang-rasyid/index.html>.

"Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri..." merujuk liputan *Langgam*, "Kesaksian Warga Air Bangis: Kami Dipaksa Pulang dengan Cara Bengis" (Agustus 2023) <https://langgam.id/kesaksian-warga-air-bangis-kami-dipaksa-pulang-dengan-cara-bengis/>.

“Setelah lahan-lahan pertanian mereka dipaksa dilepas...” merujuk liputan Awla Rajul, “Dilema Buruh-Buruh Muda dalam Deru Pembangunan Majalengka” (*Bandung Bergerak*, Oktober 2023) <https://bandungbergerak.id/artikel/detail/158984/dilema-buruh-buruh-muda-dalam-deru-pembangunan-majalengka>.

“Proyek [yang] dibekingi tentara-tentara dari Kodam Diponegoro” merujuk liputan Serat, “Konflik Agraria di Rawa Pening: Patgulipat Patok Negara di Tanah Rakyat” (Desember 2023) <https://serat.id/2023/12/18/konflik-agraria-di-rawa-pening-patgulipat-patok-negara-tentara-di-tanah-rakyat/>.

“... ada kebutuhan pengembangan kampanye di media sosial...” merujuk ringkasan laporan Reuters Institute: Mayoritas orang Indonesia (60%) mendapatkan berita dari platform media sosial, pengguna TikTok terus naik, Twitter stabil, Facebook sudah menurun, format video di YouTube, Reels, dan TikTok sangat digemari, WhatsApp masih menjadi platform paling populer digunakan penduduk Indonesia. *Digital News Report 2024* <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024/dnr-executive-summary>.

Langkah Ketiga - Menyemai Kesadaran Kritis Orang Muda

Lihat website program PhotoDemos bersama PannaFoto Institute: https://www.photodemos.org/stories_cat/suara-orang-muda/.

Lihat produksi sinema bersama Talamedia dan Kurawal dalam serial Buried Chapters: <https://www.youtube.com/@buriedchapters>.

Lihat film *Hotline 1998*: <https://www.youtube.com/watch?v=wf2NskiB9Lw&t=1077s>.

Lihat film *Acung Memilih Bersuara*: <https://www.youtube.com/watch?v=arEb9a1tmnl&t=2s>.

Lihat film *Di Balik Rupa*: <https://www.youtube.com/watch?v=otOgNCUBWSI>.

Lihat film *Dia Pergi dan Belum Kembali*: https://www.youtube.com/watch?v=eTVZ_1a7Kx0.

Epilog - Badut dan Sirkus

“Kotori ruang siber...” merujuk ruang siber kita sudah jadi mainan oligarki; Ary Hermawan, “How Indonesia’s expanding cyberspace has become an oligarchic playground to entrench power” (*Melbourne Asia Review*, Juni 2024) <https://melbourneasiareview.edu.au/how-indonesias-expanding-cyberspace-becomes-oligarchic-playground-to-entrench-powers/>.

Baca juga peringatan kemenangan Prabowo menandai sinyal kemenangan media sosial atas jurnalisme; Ahmad Arif, “Kemenangan Media Sosial, Kemunduran Demokrasi” (*Kompas*, Februari 2024) <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/02/20/kemenangan-media-sosial-kemunduran-demokrasi>.

“Memperkuat aliansi dan bekerja sama...” merujuk bahwa merespons kemenangan Prabowo Subianto, presiden

baru wajah lama yang menjadi contoh kekalahan telak agenda-agenda reformasi, Kurawal menggelar pertemuan dengan para mitra untuk merumuskan ‘Rancang Aksi’, yakni membuat peta jalan bersama dalam kerja-kerja organisasi masyarakat sipil selama tahun-tahun ke depan. Baca perdebatan mengenai tantangan masyarakat sipil di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto di *Indoprogess*, Abdil Mughis Mudhoffir, “Kemenangan Prabowo Tidak akan Mengembalikan Otoritarianisme di Indonesia” (Februari 2024) <https://indoprogess.com/2024/02/kemenangan-prabowo-tidak-akan-mengembalikan-otoritarianisme-di-indonesia/>, Coen Husain Pontoh, “Prabowo dan Keditaktoran Kapital” (Mei 2024) <https://indoprogess.com/2024/05/prabowo-dan-keditaktoran-kapital/>, Iqra Anugrah, “Tren Illiberal akan Semakin Kuat di Era Prabowo” (Mei 2024) <https://indoprogess.com/2024/05/tren-illiberal-kian-kuat-di-era-prabowo/>.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Number: 00027/2.1031/AU.1/11/1038-2/1/VII/2024

Executive Director
Kurawal Foundation

Opinion

We have audited the financial statements of Kurawal Foundation ("the Foundation"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Foundation as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Foundation in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Foundation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Foundation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Foundation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

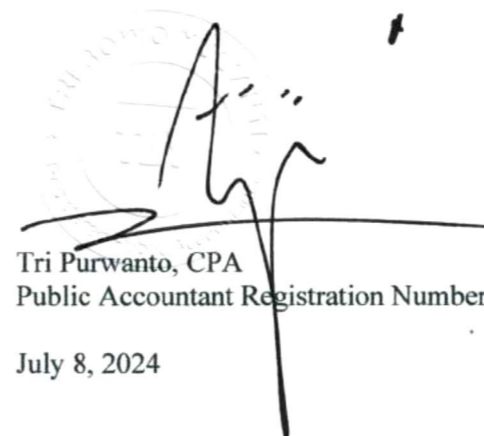
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Foundation's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Foundation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Foundation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Tri Bowo Yulianti



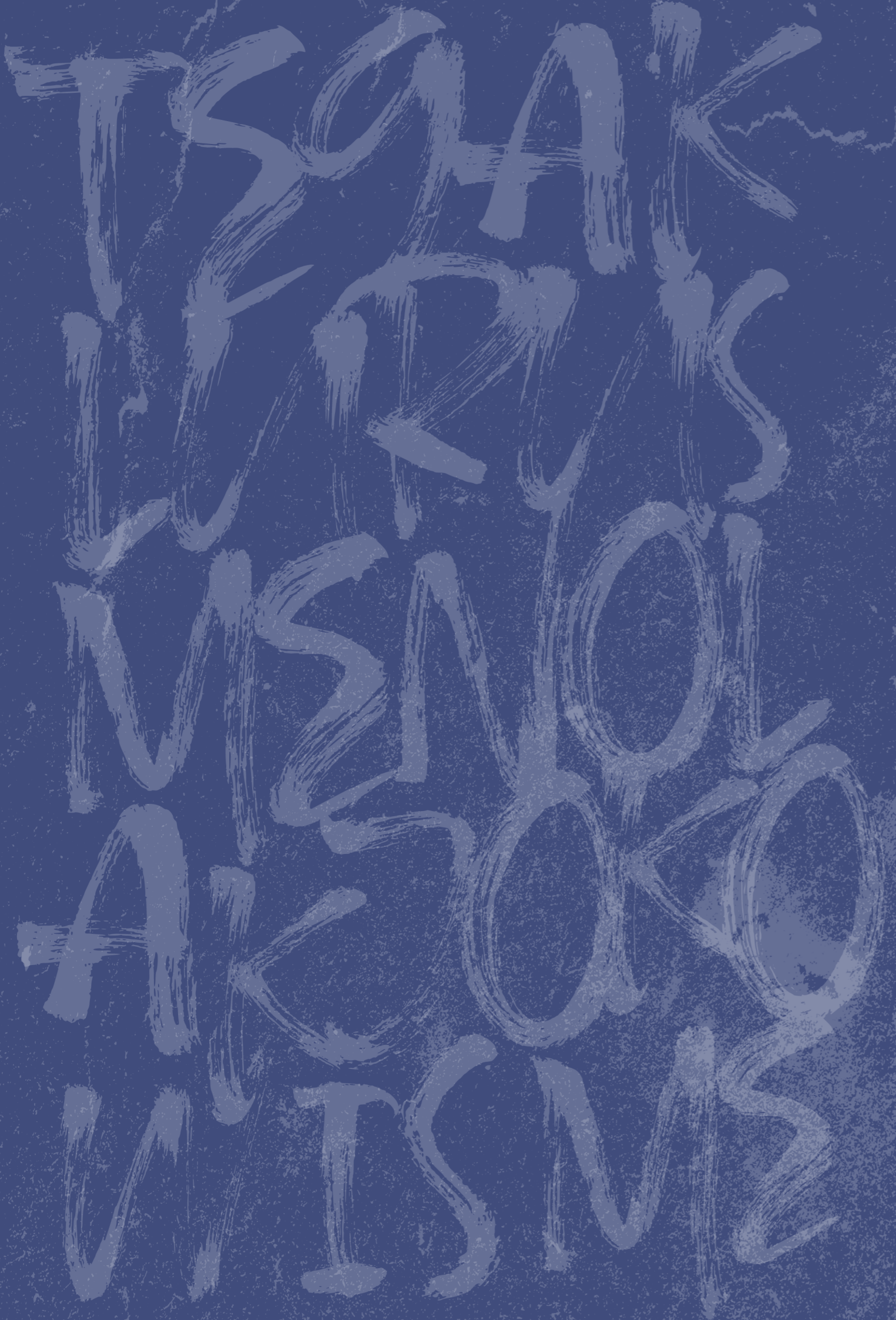
Tri Purwanto, CPA
Public Accountant Registration Number AP.1038

July 8, 2024



00027





{ KURAWAL }
FOUNDATION

include | protect | engage

- ✕ @KurawalFound_ID
- 📍 kurawalfound_id
- in kurawalfoundationid
- 📺 Kurawal Foundation

www.kurawalfoundation.org